



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERABARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPANDI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional, maka perlu melakukan penataan kembali pedoman kode klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;

14. Peraturan

14. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENPADANG PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabupatenPadang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
9. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II
KODEKLASIFIKASI
Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah, pencipta arsip menggunakan kode klasifikasi dengan berdasarkan angka/*numeric*.
- (2) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BAB III
PEMBINAAN
Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAN
Pasal 4

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kearsipan dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 26 februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TANGGAL 2019
TENTANG
PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. UMUM

1. Klasifikasi Kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan Kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan contoh penulisan Klasifikasi sebagai berikut:

1 4 5

100 : Pokok Masalah ttg PEMERINTAHAN

140 : Sub Masalah ttg PEMERINTAH NAGARI /KELURAHAN

145 : Sub Masalah ttg ADMINISTRASI NAGARI /KELURAHAN

4. Rincian Klasifikasi yang Menampung masalah-masalah fasilitas dan substansi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, adalah :

000 UMUM

010 URUSAN DALAM
020 BARANG DAN JASA
030 KEKAYAAN DAERAH
040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
050 PERENCANAAN DAN EVALUASI
060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

110 PEMERINTAHAN PUSAT
120 PEMERINTAHAN PROVINSI
130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
140 PEMERINTAHAN DESA / NAGARI/ KELURAHAN
150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
160 DPRD PROVINSI
170 DPRD KABUPATEN / KOTA
180 HUKUM
190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU / PILKADA

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN / TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 410 PEMBANGUNAN DESA / NAGARI/ KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 426 KEOLAHRAGAAN
- 427 KEPEMUDAAN
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
- 450 AGAMA
- 460 SOSIAL
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 475 TRANSMIGRASI
- 476 KELUARGA BERENCANA
- 480 MEDIA MASSA

500 PEREKONOMIAN

- 510 PERDAGANGAN
- 518 KOPERASI
- 520 PERTANIAN
- 522 KEHUTANAN
- 523 PERIKANAN DAN KELAUTAN
- 524 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- 525 PERKEBUNAN
- 526 KETAHANAN PANGAN
- 527 PENYULUHAN
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 550 PERHUBUNGAN
- 554 POS
- 555 TEKNOLOGI INFORMASI
- 556 PARIWISATA DAN REKREASI
- 557 METEOROLOGI
- 560 TENAGA KERJA
- 570 PENANAMAN MODAL
- 580 PERBANKAN MONETER

590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 PENGAIRAN
620 JALAN
630 JEMBATAN
640 BANGUNAN
650 TATA RUANG KOTA
660 TATA LINGKUNGAN
670 KETENAGAAN
680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM
690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

710 BIDANG PEMERINTAHAN
720 BIDANG POLITIK
730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
740 BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT
750 BIDANG PEREKONOMIAN
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
780 BIDANG KEPEGAWAIAN
790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN
820 MUTASI
830 KEDUDUKAN
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
850 CUTI
860 PENILAIAN
870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
880 PEMBERHENTIAN
890 KEPENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN
920 AKUNTANSI
930 PERBENDAHARAAN
940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
950 PENGELOLAAN KAS DAERAH
960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
970 PENDAPATAN

B. RINCIAN.

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)
001.4	Bandir / Umbul-Umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan

- 002.1 Bintang
- 002.2 Satyalencana
- 002.3 Satyakarya Nugraha
- 002.4 Penghargaan secara adat
- 002.5 Penghargaan lainnya
- 003 Hari Raya / Besar
- 003.1 Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan , Hari Anak, HKSN, dsb)
- 003.2 Hari Raya Keagamaan
- 003.3 Hari Ulang Tahun / HUT (Hari Jadi Provinsi/ Kabupaten/Kota)
- 004 Ucapan
- 004.1 Terima Kasih
- 004.2 Selamat
- 004.3 Mohon Diri
- 004.4 Bela Sungkawa
- 004.5 Ucapan Lainnya
- 005 Tanda Jabatan
- 005.1 Pamong Praja
- 005.2 Tanda Pengenal
- 005.3 Jabatan Lainnya
- 010 URUSAN DALAM**
- 011 Gedung Kantor, termasuk instalasi prasarana fisik
- 011.1 Listrik
- 011.2 Telepon
- 011.3 Otomasi
- 011.4 Air Minum
- 011.5 Hidrant
- 011.6 Alarm
- 011.7 Internet
- 012 Rumah Dinas
- 012.1 Tanah untuk Rumah Dinas
- 012.2 Perabot Rumah Dinas
- 012.3 Rumah Dinas Golongan I
- 012.4 Rumah Dinas Golongan II
- 012.5 Rumah Dinas Golongan III
- 012.6 Rumah/Bangunan Lainnya
- 012.7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma / hotel)
- 014 Rumah Susun Apartemen
- 015 Peminjaman sarana Prasarana Kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)
- 016 Pengurusan Kendaraan Dinas
- 017 Keamanan / Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
- 019.1 Upacara Bendera

- 019.2 Tata tempat
- 019.21 Pemasangan gambar Presiden / Wakil Presiden
- 019.22 Pemasangan gambar Gubernur / Wakil Gubernur
- 019.23 Pemasangan gambar Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota
- 019.3 Audiensi menghadap pimpinan
- 019.4 Penerimaan Tamu
- 019.5 Kerjasama
- 020 BARANG DAN JASA**
- 021 Penawaran
- 021.1 Penawaran Barang
- 021.2 Penawaran Jasa
- 022 Barang
- 022.1 Barang Bergerak
- 022.2 Barang Tidak Bergerak
- 023 Jasa
- 024 Alat Tulis
- 025 Pakaian Dinas
- 026 -
- 027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk lelang.
- 027.1 Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan / anwijzing, negoisasi, evaluasi
- 027.2 SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
- 027.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 127.4 Serah Terima Pekerjaan
- 127.5 Pemeriksaan Pekerjaan
- 127.6 Perpanjangan Waktu / Ferce majore
- 127.7 Denda
- 127.8 Sanggahan
- 127.9 Pemeliharaan Barang / Jasa
- 028 Inventaris
- 028.1 Pendapatan Barang Milik Negara
- 028.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
- 028.3 Penghapusan Barang Milik Negara
- 030 KEKAYAAN DAERAH**
- 031 Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan , tambak)
- 032 Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah dll)
- 033 Tanaman
- 034 Alat-Alat Berat
- 035 Hewan
- 036 Barang Persediaan Dalam Gedung
- 037 Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
- 038 Peralatan Pabrik , Laboratorium

- 039 Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
- 040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI**
- 041 Perpustakaan
 - 041.1 Pameran Bahan Perpustakaan
 - 041.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
 - 041.3 Sirkulasi / layanan
 - 041.31 Keanggotaan
 - 041.32 Peminjaman dan Pengembalian
 - 041.4 Deposit
 - 041.5 Pemeliharaan, Pelestarian / alih media
 - 041.6 Pembinaan Perpustakaan
 - 041.61 Bantuan Buku, Rak
 - 041.7 Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaan
 - 041.8 Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
 - 041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - 045.1 Pola Klasifikasi
 - 045.2 Akuisisi Arsip
 - 045.3 Penyusutan Arsip
 - 045.31 Jadwal Retensi Arsip
 - 045.32 Penilaian Arsip
 - 045.33 Pemindahan Arsip
 - 045.34 Penyerahan Arsip
 - 045.35 Pemusnahan Arsip
 - 045.4 Pembinaan Kearsipan
 - 045.41 Pengawasan
 - 045.42 Bimbingan Kearsipan
 - 045.5 Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
 - 045.51 Fumigasi dan Termit Control
 - 045.52 Laminasi
 - 045.53 Alih Media
 - 045.6 Layanan
 - 045.7 Pemasarakatan
 - 045.71 Pameran
 - 045.72 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
 - 045.73 Sosialisasi Kearsipan
 - 045.8 Pengembangan Sistem
 - 045.81 Sistem Kearsipan
 - 045.82 Sistem Jaringan Informasi kearsipan
- 046 Sandi
- 047 Telegram, Telex, Radio, ISB

- 048 Data Elektronik
- 049 -
- 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI**
 - Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrembang, Musrembangpus, antar Kementerian, Musrembangnas, Musrembangdes
 - 050.1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
 - 050.11 RENSTRA (Rencana Strategi)
 - 050.12 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)
 - 050.13 RENSTRA BAPELITBANGDA
 - 050.2 Program Nasional
 - 050.21 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
 - 050.22 RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran kementerian Lembaga)
 - 050.23 RKP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
 - 050.24 Rencana Kerja SKPD
 - 050.25 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
 - 050.26 Jawaban Gubernur Atas Pandangan fraksi
 - 050.27 Nota Keuangan
 - 050.28 RKT (Rencana kerja Tahunan)
 - 050.29 RKO (Rencana Kerja Operasional)
 - 051 Laporan
 - 051.1 Laporan Berkala
 - 051.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 - 052 Evaluasi
 - 052.1 Evaluasi Rencana Strategis
 - 052.11 Evaluasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
 - 052.12 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 052.13 Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Kabupaten/ Kota
 - 052.14 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN**
 - 061 Organisasi
 - 061.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - 061.2 Tata tertib Kantor, Termasuk Pengaturan hari dan jam kerja Pegawai
 - 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
 - 063 Organisasi Badan Pemerintah
 - 064 Organisasi Semi Pemerintah
 - 065 Ketatalaksanaan
 - 065.1 Tata Naskah Dinas
 - 065.2 Stempel Dinas dan Stempel jabatan
 - 065.3 Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
 - 065.4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat

- 065.5 Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Standart Operasional Prosedur
- 068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis Jabatan
- 069.1 Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
- 069.2 Uraian Jabatan
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
- 071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, Riset Design, Pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Pengembangan
- 072.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
- 072.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
- 072.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi Cluster, Kab / Kota, desa Inovatif
- 072.4 Inkubator Tehnologi dan Bisnis
- 072.5 Pameran Produk Inovasi / Ristek
- 072.6 BTC (Bisnis Tehnologi Center)
- 072.7 Rapterk (Penerapan Iptek)
- 072.8 HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)
- 073 Kajian
- 073.1 Kajian Strategis / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
- 073.2 Seminar
- 073.3 Workshop
- 073.4 Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
- 073.5 Lokakarya
- 073.6 Diseminasi / Sosialisasi hasil Penelitian
- 074 Kerjasama Penelitian
- 074.1 Instensi Pemerintah Pusat / Daerah
- 074.2 Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
- 074.3 Lembaga swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
- 074.4 Lembaga Internasional
- 075 Perekayasaan
- 076 Jarlit bang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
- 077 Publikasi Ilmiah
- 077.1 Jurnal Ilmiah
- 080 KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI**
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
- 084 Instansi Lainnya (diluar Kemendagri)
- 085 Internasional di dalam Negeri
- 086 Internasional di luar Negeri
- 090 PERJALANAN DINAS**
- 091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden Ke Daerah

- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar negeri
- 100 PEMERINTAHAN**
- 101 Bentuk Pemerintah
- 102 Sistem Pemerintah
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT**
- 111 Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
- 111.1 Penanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
- 111.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
- 113 Susunan Kabinet
- 113.1 Reshuffle
- 113.2 Penunjukan Menteri ad Intren
- 113.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
- 114 Kementerian Dalam Negeri
- 114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementrian Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi Daerah
- 119 Kerjasama Antar Kementrian
- 120 PEMERINTAH PROVINSI**
- 120.01 Kebijakan Pemerintah Provinsi
- 120.02 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
- 120.03 Monografi, tambahan kode wilayah
- 120.1 Koordinasi
- 120.11 Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 120.12 Instansi Vertikal
- 120.13 Kerjasama antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri
- 121 Gubernur, meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
- 122 Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan Sebagainya
- 123 Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
- 124 Badan-badan pertimbangan daerah, meliputi Muspida
- 125 Pembentukan / Pemekaran

- 125.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 125.2 Pembentukan wilayah
- 125.3 Perubahan Batas Wilayah
- 125.4 Pemekaran Wilayah
- 125.5 Permasalahan Batas wilayah
- 125.6 Pemindahan Ibu Kota Provinsi
- 125.7 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**
- 130.01 Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota
- 130.02 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / walikota (LKPJ)
- 130.03 Monografi
- 130.04 Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 130.1 Koodinasi
- 130.11 Satuan kerja Perangkat Daerah
- 130.12 Instansi Vertikal
- 130.13 Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan Luar negeri
- 130.2 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- 131 Bupati / Walikota, meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan Sebagainya
- 131.1 Berita Acara Jabatan dan Memori Bupati / Walikota
- 131.2 Sambutan / Pengarahan / Amanat Bupati / Walikota
- 132 Wakil Bupati / Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan Sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, serah terima jabatan
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah, meliputi Muspida
- 135 Pembentukan / Pemekaran Wilayah
- 135.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 135.2 Pembentukan Wilayah
- 135.3 Perubahan Batas wilayah
- 135.4 Pemekaran Wilayah
- 135.5 Permasalahan Batas wilayah
- 135.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kota
- 135.7 Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah , jalan
- 135.8 Pemetaan Wilayah
- 136 Pembagian wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
- 138.1 Pembentukan Kecamatan
- 138.2 Pemekaran Kecamatan
- 138.3 Perluasan / Perubahan batas wilayah Kecamatan
- 138.4 Pemindahan Ibu Kota Kecamatan

- 138.5 Laporan Kecamatan
- 140 PEMERINTAHAN DESA / NAGARI/ KELURAHAN**
- 141 Pemerintah Desa
- 141. 1 Meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
- 141. 2 Perangkat Desa
- 142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan (APBDes / Kel)
- 143 Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll
- 143.1 Tanah Hak Pakain Desa
- 143.2 Jalan Desa
- 143.3 Bangunan Desa
- 143.4 Kekayaan Desa Lainnya
- 144 Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD
- 145 Administrasi Desa / Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
- 146 Kewilayahan
- 146.1 Pembentukan Desa / Nagari/ Kelurahan
- 146.2 Pemekaran Desa / Nagari/ Kelurahan
- 146.3 Perubahan dan Perluasan Batas wilayah Desa /Nag/Kelurahan
- 146.4 Perubahan nama Desa / Nagari/ Kelurahan
- 146.5 Permasalahan Batas Desa / Nagari/ Kelurahan
- 146.6 Penyatuan Desa / Nagari/ Kelurahan
- 146.7 Penghapusan Desa / Nagari/ Kelurahan
- 147 RT – RW
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD**
- 151 Keanggotaan MPR
- 151.1 Pencalonan
- 151.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 151.3 Pemberhentian
- 151.31 Recall
- 151.32 Meninggal
- 151.4 Pelanggaran
- 151.5 Pergantian antar Waktu
- 152 Keanggotaan DPR
- 152.1 Pencalonan
- 152.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 152.3 Pemberhentian
- 152.31 Recall
- 152.32 Meninggal
- 152.4 Pelanggaran
- 152.5 Pergantian Antar waktu
- 153 Keanggotaan DPD
- 153.1 Pencalonan
- 153.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 154 Persidangan

155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan lain (pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
162.16	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertip
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
170	DPRD KABUPATEN / KOTA
171	Keanggotaan

- 171.1 Pencalonan
- 171.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 171.3 Pelanggaran
- 171.4 Pemberhentian Antar Waktu
- 171.41 Meninggal Dunia
- 171.42 Mengundurkan Diri
- 171.43 Diberhentikan
- 171.5 Alat Kelengkapan Dewan
- 171.51 Pimpinan
- 171.52 Badan Musyawarah
- 171.53 Komisi
- 171.54 Badan Legislasi Daerah
- 171.55 Badan Anggaran
- 171.56 Badan kehormatan
- 171.57 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
- 172 Persidangan
- 172.1 Rapat-Rapat
- 172.11 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
- 172.12 Rapat Pimpinan DPRD
- 172.13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
- 172.14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- 172.15 Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
- 172.16 Rapat Fraksi
- 172.2 Fraksi
- 172.3 Tata Tertib
- 172.4 Kode Etik
- 172.5 Reses
- 172.6 Peninjauan / Kunjungan Lapangan
- 172.7 Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
- 173 Kesejahteraan
- 173.1 Keuangan
- 173.2 Penghargaan
- 174 Hak
- 180 HUKUM**
- 180.1 Konstitusi
- 180.11 Dasar Negara
- 180.12 Undang-Undang Dasar
- 180.13 Undang-Undang
- 180.14 Peraturan Pemerintah
- 180.15 Keppres / Perpres / Inpres
- 180.16 Kepmen / Permen / Inmen
- Perundangan tingkat Provinsi meliputi Perda, Kegub / Pergub
- 180.17 /
Ingub

- 180.18 Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Perda, KepBup/KepWal, PerBup/PerWal
- 180.19 Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
- 180.2 Tap MPR
- 180.3 Konvensi
- 180.4 Amandemen
- 180.5 Amnesti / Abolisi / Grasi
- 181 Perdata
- 181.1 Tanah
- 181.2 Rumah
- 181.3 Utang/Piutang
- 181.31 Gadai
- 181.32 Hipotik
- 181.4 Notaris
- 182 Pidana
- 182.1 Tindak Pidana Umum
- 182.2 Tindak Pidana Khusus
- 183 Peradilan
- 183.1 Jenis-jenis Peradilan
- 183.11 Peradilan Umum
- 183.111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
- 183.112 Peradilan Tinggi
- 183.113 Mahkamah Agung
- 183.12 Peradilan Agama Islam
- 183.121 Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
- 183.122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
- 183.123 Mahkamah Islam Agung
- 183.13 Peradilan Militer
- 183.131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
- 183.132 Mahkamah Militer Tinggi
- 183.133 Mahkamah Militer Agung
- 183.14 Peradilan Tata Usaha Negara
- 183.141 Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
- 183.142 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- 183.143 Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
- 183.15 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
- 183.16 Peradilan Hak Asasi Manusia
- 183.17 Mahkamah Konstitusi
- 183.18 Komisi Yudisial
- 183.19 Ombustmen
- 183.2 Upaya Hukum
- 183.21 Banding
- 183.22 Kasasi
- 183.23 Derden Verset
- 183.24 Peninjauan Kembali

- 183.25 Grasi, Amnesti, Abolisi
- 183.3 Eksekusi
- 183.4 Pembinaan 19okum, meliputi kadarkum
- 183.5 Bantuan Hukum, meliputi LBH
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
- 185.1 Visa
- 185.2 Paspor
- 185.3 Exit
- 185.4 Reentry
- 185.5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 186 Kepenjaraan
- 186.1 Registrasi narapidana
- 186.2 Pembinaan narapidana
- 186.3 Pembebasan narapidana
- 186.4 Tahanan titipan
- 187 Kejaksanaan
- 187.1 Penuntutan Umum
- 187.2 Penuntutan Khusus
- 188 Hukum Adat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI**
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
- 194 Perwakilan RI di Luar Negeri
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar Negeri
- 200 POLITIK**
- 201 Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
- 201.1 Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
- 201.2 Kesatuan Bangsa
- 201.3 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk
Laporannya
- 201.4 Keadaan Politik Luar Negeri
- 201.5 Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam
- 201.6 Orde Baru
- 201.7 Orde Reformasi
- 210 KEPARTAIAN**
- 211 Partai Politik
- 211.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
- 211.2 Program Kerja , data Kegiatan PARPOL
- 211.3 Pembinaan PARPOL
- 211.4 Hasil Munas / Musda PARPOL
- 211.5 Struktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan
PARPOL
- 211.6 Data inventaris dan keuangan PARPOL

- 212 Partai/Organisasi Terlarang
- 212.1 Keputusan Pembubaran partai/ organisasi terlarang
- 212.2 Daftar dan data pengurus anggota partai / organisasi terlarang
- 212.3 Ijin Meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai /organisasi terlarang
- 212.4 Daftar berkala mengenai Keadaan anggota partai/ organisasi Terlarang
- 212.5 Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi Terlarang
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
- 221 Pembentukan organisasi
- 221.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 221.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 221.3 Program Kerja Organisasi
- 221.4 Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 222 Pembinaan organisasi
- 222.1 Kegiatan organisasi dan pelaporannya
- 222.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 223 Ormas Berdasarkan Kerohanian
- 223.1 Nahdatul Ulama
- 223.2 Muhammadiyah
- 223.3 Persis
- 223.4 PGI
- 223.5 Organisasi Lainnya
- 224 Lembaga Adat
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**
- 231 Pembentukan organisasi
- 231.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 231.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 231.3 Program kerja organisasi
- 231.4 Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 232 Pembinaan Organisasi
- 232.1 Kegiatan organisasi dan pelaporannya
- 232.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 240 ORGANISASI PEMUDA**
- 241 Pembentukan organisasi
- 241.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 241.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 241.3 Program kerja organisasi
- 241.4 Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 242 Pembinaan Organisasi
- 242.1 Kegiatan organisasi dan pelaporannya
- 242.2 Daftar Inventaris kekayaan organisasi
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN**
- 251 Pembentukan organisasi
- 251.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- 251.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 251.3 Program kerja organisasi
- 251.4 Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 252 Organisasi Petani
- 253 Organisasi Nelayan
- 254 Organisasi Angkutan Darat
- 255 Organisasi Angkutan Laut
- 256 Organisasi Angkutan Udara
- 257 Pembinaan Organisasi

- 257.1 Kegiatan organisasi dan pelaporannya
- 257.2 Daftar Inventaris kekayaan organisasi
- 260 ORGANISASI WANITA**
- 261 Pembentukan organisasi
- 261.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 261.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 261.3 Program kerja organisasi
- 261.4 Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 262 Pembinaan Organisasi
- 261.1 Kegiatan organisasi dan pelaporannya
- 262.2 Daftar Inventaris kekayaan organisasi
- 270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut / Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 273.1 Dana Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih / Daftar Pemilih
- 276 Sarana
- 276.1 TPS
- 276.2 Kendaraan
- 276.3 Surat Suara
- 276.4 Kotak Suara
- 276.5 Dana
- 277 Pemungutan Suara / Penghitungan Suara
- 278 Hasil Pemilu
- 278.1 Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
- 278.2 Penetapan pemenang pilkada
- 279 KPU / KPUD
- 280 PENGAWASAN PEMILU /PILKADA**
- 281 Pemantauan
- 282 Pelanggaran
- 283 Sengketa
- 284 Panwaslu
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 300.1 Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
- 300.2 Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
- 300.3 Pencegahan dan penanggulangan gangguan /ancaman keamanan/ketertiban umum
- 300.4 Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
- 301 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
- 302 Pengawasan Trantibum
- 303 Penegakan pelaksanaan perda
- 304 Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda
- 305 Patroli Wilayah
- 306 Laporan Kunjungan VIP,VVIP,tamu asing
- 306.1 Pengamanan
- 306.2 Pengawalan
- 307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
- 310 PERTAHANAN**
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Ketahanan Bangsa
- 315 Ketahanan Ekonomi
- 316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- 320 KEMELITERAN/TNI**
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib militer
- 323 Operasi militer
- 324 Kekayaan TNI
- 325 Kemanunggalan TNI dengan rakyat
- 330 KEAMANAN**
- 331 Kepolisian
- 331.1 Polisi Pamong Praja
- 332 Huru hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat kaleng
- 337 Pengaduan Masyarakat
- 338 Hibauan/Larangan
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)**
- 340.1 Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
- 341 Pembinaan dan Diklat
- 341.1 Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas
- 341.2 Pendidikan/Latihan Linmas
- 341.3 Latihan PAM swakarsa
- 341.4 Pendidikan/Latihan MENWA

342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian tali asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan Uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiyaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Penipuan dan pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya (Traficking, hipnotis, dll)
360	BENCANA
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/unsur pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
370	KECELAKAAN
371	Latihan SAR
372	Latihan Keterampilan Penyelamatan di air dan menyelam
373	Latihan Managemen bagi Pejabat
374	Satkorlat dan Satlak PBP
375	Pelatihan Kemampuan pusdalop bagi aparat PBP
376	Latihan keterampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/Penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- 381 Perencanaan
- 381.1 Perencanaan Teknis
- 381.2 Rekomendasi
- 382 Bantuan Bencana
- 383 Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
- 384 Sarana prasara rehabilitasi dan rekonstruksi
- 385 PUSDALOPS**
- 386 Kunjungan lapangan
- 387 Relawan
- 388 Laporan bencana
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN**
- 391 Instansi pemerintah pusat
- 392 Instansi pemerintah di daerah
- 393 Lembaga International
- 394 Lembaga non pemerintah nasional
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 401 Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
- 410 BANGUNAN DESA/KELURAHAN**
- 411 Gotong royong
- 411.1 Swadaya Gotong royong
- 411.11 Pembinaan
- 411.12 Pungutan
- 411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
- 411.3 Latihan kerja Masyarakat
- 411.4 Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)
- 411.5 Penyuluhan Masyarakat Desa
- 411.6 Kelembagaan Desa
- 411.7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- 412 Perekonomian Desa
- 412.1 Produksi Desa
- 412.11 Pengolahan
- 412.12 Pemasaran
- 412.2 Pembiayaan Pembangunan Desa
- 412.21 Inventarisasi Data
- 412.22 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
- 412.23 Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
- 412.24 Bantuan/Stimulasi
- 412.25 Perkreditan Desa
- 412.26 Pelaporan
- 412.27 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
- 412.3 Koperasi Desa
- 412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- 412.32 Koperasi Unit Desa (KUD)
- 413 Sarana dan Prasarana Desa
- 413.1 Pemukiman Kembali penduduk

- 413.2 Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
- 413.3 Perbaikan kampung
- 413.4 Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 414 Pengembangan Desa
- 414.1 Perlombaan Desa dan Kelurahan
- 414.11 Pedoman
- 414.12 Penilaian
- 414.13 Kejuaraan
- 415 Koordinasi
- 415.1 Kerjasama
- 414.11 Luar Negeri
- 415.12 Perguruan Tinggi
- 415.13 Kementerian/Lembaga Pemerintah
- 415.14 Lembaga lainnya
- 420 PENDIDIKAN**
- 420.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
- 420.2 Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
- 420.3 Pendidikan Kemasyarakatan
- 421 Sekolah (termasuk akreditasi)
- 421.1 Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
- 421.2 Sekolah Dasar
- 421.3 Sekolah Menengah
- 421.4 Sekolah Kejuruan
- 421.5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
- 421.6 Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
- 421.7 Kegiatan Pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar
- 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- 421.9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
- 422.1 Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
- 422.2 Tahun Pelajaran
- 422.3 Hari Libur
- 422.4 Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
- 422.5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
- 422.6 Ijazah, Sertifikat
- 422.7 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 423 Metode Belajar
- 423.1 Kuliah
- 423.2 Ceramah, Simposium, Seminar
- 423.3 Diskusi
- 423.4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL

- 423.5 Kurikulum
- 423.6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
- 423.7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)
- 424.1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
- 424.2 Sertifikasi Guru
- 425 Sarana Pendidikan
- 425.1 Bangunan Pendidikan
- 425.11 Gedung Sekolah
- 425.12 Kampus
- 425.13 Pusat Kegiatan
- 425.14 Perpustakaan
- 425.15 Laboratorium
- 425.2 Buku
- 425.3 Perlengkapan Pendidikan
- 425.4 Sistem Informasi Pendidikan
- 425.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
- 426 Keolahragaan
- 426.1 Pembinaan Keolahragaan
- 426.11 Olah raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
- 426.12 Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
- 426.13 Olah raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olahraga tradisional)
- 426.14 Iptek dan Industri Olah raga
- 426.15 Sarana Prasarana Keolahragaan
- 426.2 Kemitraan Olah Raga
- 427 KEPEMUDAAN**
- 427.1 Pertukaran Pemuda
- 427.2 Paskibraka
- 427.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
- 427.4 Kemitraan Pemuda
- 427.5 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan/Kepanduan
- 430 KEBUDAYAAN**
- 430.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
- 430.2 Pembinaan bidang kebudayaan
- 431 Kesenian
- 431.1 Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni 26usic, seni rupa, seni lukis dll)
- 431.2 Sarana
- 431.21 Gedung Kesenian
- 431.22 Padepokan
- 431.23 Lembaga Adat

- 431.24 Kegiatan adat/tradisi
 - Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : Festival , pentas
- 431.3 seni
- 432 Kepurbakalaan
 - 432.1 Museum
 - 432.2 Peninggalan Kuno
 - 432.21 Candi, termasuk pemugaran
 - 432.22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Penghayat Kepercayaan
- 440 KESEHATAN**
 - 440.1 Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan
 - 441 Pembinaan Kesehatan
 - 441.1 Gigi
 - 441.2 Mata
 - 441.3 Jiwa
 - 441.4 Kanker
 - 441.5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
 - 441.6 Perawatan
 - 441.7 Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
 - 441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
 - 441.9 JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
 - 441.91 JAMKESMAS
 - 441.92 JAMKESDA
 - 441.93 JAMPERSAL
 - 441.94 Jaminan lainnya
 - 442 Obat-obatan
 - 442.1 Pengadaan
 - 442.2 Pemeriksaan Obat
 - 442.3 Penyimpanan Obat
 - 442.4 Distribusi obat
 - 442.5 Pengawasan Obat
 - 442.51 Obat Generik
 - 442.52 Obat Terlarang
 - 442.53 Pemalsuan Obat
 - 443 Pemberantasan dan pencegahan penyakit
 - 443.1 Pencegahan Penyakit
 - 443.2 Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P.2.M.L)
 - 443.21 Kusta
 - 443.22 Kelamin, HIV, HIDS, IMS
 - 443.23 Frambusia
 - 443.24 T.B.C
 - 443.25 Kolera
 - 443.26 SARS, dan jenis penyakit lainnya

- 443.3 Pemberantasan penyakit menular sumber binatang (P2B)
- 443.31 Malaria
- 443.32 Dengue Heemorrhagie Fever (DHF)
- 443.33 Filaria
- 443.34 Serangga

- 443.35 Rabies
- 443.36 Antrak
- 443.37 Leptosirosis
- 443.38 Chikungunya
- 443.39 Penyakit lainnya
- 443.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
- 443.41 A. Pektoris
- 443.42 IMA (Irama Mastcmik Akut)
- 443.43 Hipertensi
- 443.44 Stroke
- 443.45 Diabetes Melitus
- 443.46 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Serviks
- 443.47 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Mammae
- 443.48 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Hepar
- 443.49 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Paru, Dan Penyakit Lainnya
- 443.5 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
- 443.51 Imunisasi
- 443.52 Surveilanse
- 443.53 Pestisida
- 443.54 Pencemaran udara
- 443.55 Jamban Keluarga
- 443.56 Kesehatan Institusi
- 443.6 Higiene sanitasi
- 443.61 Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
- 443,62 Sarana air minum
- 443.63 Pestisida, insektisida
- 443.64 Pencemaran
- 443.65 Jamban keluarga, Sanitasi rumah tangga
- 443.66 Kesehatan institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
- 443,67 Higiene sanitasi CA. Mammae
- 443.68 Higiene sanitasi CA. Hepar
- 443.69 Higiene sanitasi CA. Paru
- 443.7 Kejadian khusus
- 443.71 Dekopensatiokordosis (Serangan jantung)
- 443.72 Asma
- 443.73 Psikosis
- 443,74 PPOM
- 443.75 Kecelakaan Lalu Lintas

- 443.76 Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 444 Gizi dan Pengawasan Makanan
 - 444.1 Kekurangan Makanan
 - 444.2 Bahaya kelaparan, busung lapar ,gizi busuk
 - 444.3 Keracunan Makanan
 - 444.4 Menu makanan rakyat
 - 444.5 Gondok endemic (GAKI)
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
 - 445.1 Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisis pasien,visum)
 - 445.11 Rawat Inap
 - 445.12 Rawat Jalan
 - 445.13 IGD
 - 445.14 IBS
 - 445.15 ICU
 - 445.16 MCU (Medical Check Up)
 - 445.2 Penunjang Medis
 - 445.21 Farmasi
 - 445.22 Rekam Medik
 - 445.23 Radiologi
 - 445.24 Gizi
 - 445.25 Laboratorium Klinik
 - 445.26 Laboratorium Patologi Anatomi,Forensik
 - 445.27 Bank Daerah Rumah Sakit
 - 445.28 Sanitasi Rumah Sakit
 - 445.29 CSSD / Laundry
 - 445.3 Keperawatan
 - 445.4 Komite Medik
 - 445.5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
 - 445.6 Mutu Rumah Sakit
 - 445.61 Akreditasi
 - 445.62 ISO
 - 445.63 PSBH (Problem Solving For Better Hospital)
 - 445.64 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - 445.7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
 - 445.8 Promosi Layanan Kesehatan
 - 445.9 Kasus Hukum Rumah Sakit
- 446 Tenaga Medis
 - 446.1 Perencanaan Tenaga Medis
 - 446.2 Pendayagunaan Tenaga Medis
 - 446.21 Perijinan Untuk Tenaga Medis
 - 446.22 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
 - 446.23 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
 - 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan / Medis
 - 446.4 Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
 - 446.5 Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan

- Spesialis
- 447 Peralatan Kesehatan
- 447.1 Standarisasi
- 447.2 Penyimpanan
- 447.3 Distribusi
- 447.4 Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan

- 448 Pengobatan Alternatif
- 448.1 Pijat
- 448.2 Akupunktur
- 448.3 Jamu dan Herbal
- 448.4 Dukun
- 449 Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
- 449.1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
- 449.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
- 449.3 Rumah Bersalin
- 449.4 Posyandu
- 449.5 Laboratorium Kesehatan
- 449.6 Apotik
- 449.61 Surat Izin
- 449.62 Surat Izin Kerja
- 449.7 Sanatorium Kesehatan
- 450 AGAMA**
- 450.1 Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
- 450.2 Bantuan dibidang Keagamaan
- 451 Islam
- 451.1 Peribadatan
- 451.11 Sholat
- 451.12 Zakat,Infaq, Shodaqoh
- 451.13 Puasa
- 451.14 Umroh dan Haji
- 451.2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla,Surau)
- 451.3 Tokoh Agama
- 451.4 Pendidikan Agama
- 451.41 Pendidikan Tinggi Agama
- 451.42 Menengah , MTs, MA
- 451.43 Dasar, Pra Sekolah,MI
- 451.44 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
- 451.45 Sarana Pendidikan Meliputi Buku,Gedung Sekolah dll
- 451.46 Tenaga Pengajar
- 451.47 Dakwah (Pengajian, MTQ)
- 451.48 Lembaga Pendidikan
- 451.5 Wakaf
- 451.6 Mazhab Agama Islam

- 451.7 Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
- 451.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- 452 Kristen Protestan
 - 452.1 Peribadatan
 - 452.2 Rumah Ibadah Gereja dll
 - 452.3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
 - 452.4 Mazhab Agama Kristen Protestan
 - 452.5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
 - 453.1 Peribadatan
 - 453.2 Rumah Ibadah Gereja dll
 - 453.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 453.4 Mazhab Agama Khatolik
 - 453.5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - 454.1 Peribadatan
 - 454.2 Rumah Ibadah Pura dll
 - 454.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 454.4 Mazhab Agama Hindu
 - 454.5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - 455.1 Peribadatan
 - 455.2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
 - 455.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 455.4 Mazhab Agama Budha
 - 455.5 Organisasi Agama Budha
- 456 Kong Hu Cu
 - 456.1 Peribadatan
 - 456.2 Rumah Ibadah Klenteng dll
 - 456.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 456.4 Mazhab Agama Kong Hu Cu
 - 456.5 Organisasi Agama Kong Hu Cu
- 460 SOSIAL**
- 461 Rehabilitasi penyandang Cacat
 - 461.1 Cacat Ganda
 - 461.2 Cacat Fisik
 - 461.3 Cacat Mental
- 462 Rehabilitasi Sosial
 - 462.1 Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
 - 462.2 Pengemis
 - 462.3 Tuna susila
 - 462.4 Anak nakal
 - 462.5 Tuna wisma
- 463 Kesejahteraan anak dan keluarga
 - 463.1 Kesejahteraan Anak

- 463.11 Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
- 463.12 Perlindungan Anak
- 463.13 Anak Asuh
- 463.2 Kualitas Hidup Perempuan
- 463.21 Perlindungan Perempuan
- 463.22 Ibu Teladan
- 463.23 Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 464 Keperintisan dan Kepahlawanan
- 464.1 Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
- 464.2 Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
- 464.3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
- 465.1 Lanjut Usia
- 465.2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
- 465.3 Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll
- 466 Sumbangan sosial
- 466.1 Korban bencana
- 466.11 Jaminan sosial
- 466.2 Pencairan dana untuk sumbangan : Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dsb
- 466.3 Panti Asuhan
- 467 Bimbingan sosial
- 467.1 Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
- 468 PMI
- 469 Makam
- 469.1 Umum
- 469.2 Pahlawan
- 469.3 Khusus, Keluarga, Raja
- 469.4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
- 470.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
- 471 Pendaftaran Penduduk
- 471.1 Identitas Penduduk
- 471.11 Biodata
- 471.12 Nomor Induk Kependudukan
- 471.13 Kartu Tanda Penduduk
- 471.14 Kartu Keluarga
- 471.15 Advokasi Identitas Penduduk
- 471.2 Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
- 471.21 Perpindahan Penduduk WNI
- 471.22 Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah Indonesia

- 471.23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
- 471.24 Daerah Terbelakang
- 471.25 Bedol Desa
- 471.3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
- 471.31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
- 471.32 Orang asing tinggal sementara
- 471.33 Orang asing tinggal tetap
- 471.34 Perpindahan penduduk antar Negara diwilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
- 471.4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
- 471.41 Akibat bencana alam
- 471.42 Akibat kerusakan sosial
- 471.43 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
- 471.44 Pendaftaran penduduk rentan
- 472 Pencatatan Sipil
- 472.1 Kelahiran kematian dan advokasi
- 472.11 Kelahiran
- 472.12 Kematian
- 472.13 Advokasi
- 472.2 Perkawinan, perceraian dan advokasi
- 472.21 Perkawinan Agama Islam
- 472.22 Perkawinan Agama non Islam
- 472.23 Perceraian Agama Islam
- 472.24 Perceraian Agama non Islam
- 472.25 Advokasi
- 472.3 Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
- 472.31 Pengangkatan anak
- 472.32 Pengakuan anak
- 472.33 Pengesahan anak
- 472.34 Perubahan akta
- 472.35 Pembatalan akta
- 472.36 Advokasi
- 472.4 Pencatatan Kewarganegaraan
- 472.41 Akibat perkawinan
- 472.42 Akibat kelahiran
- 472.43 Non Perkawinan/Non kelahiran
- 472.44 Naturalisasi
- 472.45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
- 473.1 Teknologi Informasi
- 473.2 Pengolahan Data Kependudukan
- 473.21 Pendaftaran Penduduk
- 473.22 Kejadian vital penduduk
- 473.23 Penduduk non registrasi
- 473.3 Pelayanan informasi kependudukan

- 474 Perkembangan penduduk
- 474.1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - 474.11 Struktur Jumlah
 - 474.12 Komposisi
 - 474.13 Fertilitas
 - 474.14 Kesehatan Reproduksi
 - 474.15 Morbiditas Penduduk
 - 474.16 Mortalitas Penduduk
- 474.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - 474.21 Anak dan remaja
 - 474.22 Penduduk usia produktif
 - 474.23 Penduduk lanjut usia
 - 474.24 Gender
- 474.3 Penataan Persebaran Penduduk
 - 474.31 Migrasi antar wilayah
 - 474.32 Urbanisasi
- 474.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
- 474.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
- 475 Transmigrasi
 - 475.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
 - 475.11 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha didaerah transmigrasi
 - 475.12 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
 - 475.13 Permasalahatan/sosialisasi transmigrasi
 - 475.14 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
 - 475.15 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
 - 475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
 - 475.17 Kerjasama dibidang transmigrasi
 - 475.18 Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik
 - 475.2 Pemukiman transmigrasi
 - 475.21 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
 - 475.22 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
 - 475.23 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
 - 475.24 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman
 - 475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigrasi, fasilitas umum/sosial dan jaringan transportasi
 - 475.26 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
 - 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
 - 475.28 Tata ruang pemukiman transmigrasi

- 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
- 475.282 Rancangan kapling TSM
- 475.283 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
- 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
- 475.285 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
- 475.286 Pengukuran batas unit pemukiman
- 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.29 Sarana pemukiman transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.292 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475.293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
- 475.294 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
- 475.295 Pembinaan , pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
- 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.32 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
- 475.33 Pengerahan
- 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
- 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
- 475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
- 475.34 Pemberangkatan transmigran
- 475.341 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
- 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
- 475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
- 475.344 Pengawalan perjalanan transmigran
- 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
- 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
- 475.35 Penempatan transmigran
- 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
- 475.352 Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
- 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
- 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
- 475.41 Pelatihan transmigran
- 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
- 475.412 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
- 475.413 Penyusunan calon peserta/pelatih

- 475.42 Penampungan transmigran di transit
- 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
- 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
- 475.423 Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
- 475.51 Identifikasi dan penjajagan pembinaan
- 475.511 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- 475.512 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- 475.513 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
- 475.52 Pembinaan Pendidikan
- 475.521 Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
- 475.522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
- 475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
- 475.54 Pembinaan kesehatan
- 475.541 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
- 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- 475.543 Pendistribusian bantuan pangan
- 475.55 Pembinaan rokhani
- 475.551 Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
- 475.552 Bimbingan adaptasi masyarakat
- 475.553 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
- 475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi
- 475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
- 475.58 Penilaian transmigran teladan
- 475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
- 476 Keluarga Berencana
- 476.1 Alat Kontrasepsi
- 476.2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
- 476.3 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
- 476.4 Pos KB desa
- 476.5 Akseptor KB
- 480 MEDIA MASSA**
- 480.1 Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa
Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila
- 481 terjadi pelanggaran
- 481.1 Surat kabar
- 481.2 Majalah
- 481.3 Buletin
- 481.4 Jurnal
- 481.5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik

- 481.51 Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
- 481.52 Perekonomian dan Perbankan
- 481.53 Bidang lainnya
- 481.6 Layanan informasi/Leaflet
- 481.7 Masukan Analisis Gubernur
- 482 Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
 - 482.1 Radio
 - 482.2 Televisi
 - 482.3 Film Dokumenter
 - 482.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
 - 482.5 Kelompok Pemantau Isi Siaran
 - 482.6 Pengkajian Isi Siaran
 - 482.7 SDM Penyiaran
- 483 Periklanan
 - 483.1 Ketentuan Pemasangan Reklame
 - 483.2 Pameran
- 484 Kewartawanan/Jurnalistik
 - 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi
 - 484.2 Kasus-kasus kewartawanan
 - 484.3 Penyalahgunaan Profesi
 - 484.4 Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
 - 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
 - 484.6 Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
 - 484.7 Temu Pers/Konferensi Pers
 - 484.8 Pers Tour
 - 484.9 Kunjungan Wartawan Asing
- 485 Penyuluhan Masyarakat
 - 485.1 Publikasi
 - 485.2 Pendirian information center
- 486 Pembinaan bidang Infokom
 - 486.1 Training Fotografi
 - 486.2 Training Berita Jurnalistik
 - 486.3 Bintek Infokom
 - 486.4 Rakorda Infokom
 - 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
 - Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten PADANG
 - 486.6 PARIAMAN
- 487 Hubungan Antar Lembaga
 - 487.1 Non Pemerintah
 - 487.11 Wahana Komunikasi Masyarakat
 - 487.12 Lembaga Komunikasi Masyarakat
 - 487.2 Lembaga Pemerintah
 - 487.21 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
 - 487.22 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)

- 487.3 Luar negeri
- 487.31 Promosi Luar negeri
- 487.32 Kunjungan Wartawan asing
- 488 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
- 489.1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
- 489.2 Dialog Interaktif
- 489.3 Rubrik
- 489.4 Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
- 489.5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
- 500 PEREKONOMIAN**
- 500.1 Dewan stabilitasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya
- 510 PERDAGANGAN**
- 510.1 Promosi perdagangan
- 510.11 Pekan raya
- 510.12 Iklan
- 510.13 Pameran
- 510.14 Event-event
- 510.15 Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
- 510.2 Pelelangan, distribusi
- 510.21 Pemasaran Sembako
- 510.22 Pemasaran hasil industri
- 510.23 Penentuan harga pokok
- 510.3 Bina usaha dan sarana Perdagangan
- 510.31 Renana dan program Kerja
- 510.32 Pelaksanaan Pelayanan administrasi
- 510.33 Pelaksanaan Teknis
- 510.34 Pemantauan
- 510.35 Evaluasi dan Pelaporan
- 510.4 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
- 510.41 Pernerbitan SIUP
- 510.42 Perpanjangan
- 510.43 Ijin prinsip
- 510.44 Rekomendasi
- 510.5 Perdagangan antar pulau
- 510.51 Kerjasama bahan baku
- 510.52 Industri pemasaran
- 510.53 Kontrak
- 510.6 T e r a

- 510.61 Tera dan Tera ulang
- 510.62 Takaran
- 510.63 Timbangan dan anak Timbangan
- 510.64 Kalibrasi
- 510.65 Cap tanda tera
- 510.66 Biaya tera
- 510.7 Bantuan Peralatan
- 510.71 Proposal
- 510.72 Surat Perjanjian / Kontrak
- 510.73 Serah Terima
- 510.8 Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
- 510.9 Kemetrologian
- 510.91 Standart Tingkat Tiga
- 510.92 Standart Kerja Satuan Ukuran
- 510.93 Ukuran Metrologi
- 510.931 Peralatan
- 510.932 Laboratorium Metrologi Legal
- 510.933 Tanki Ukur Mobil
- 510.934 Meter Taxi
- 510.935 KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
- 510.936 S P B U
- 511 Pemasaran
- 511.1 Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
- 511.2 Pasar
- 511.3 Pertokoan, kaki lima, kios
- 511.4 Pusat perbelanjaan
- 512 Ekspor
- 512.1 Ekspor Hasil Industri
- 512.2 Ijin Ekspor
- 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
- 512.4 Managemen Perdagangan Internasional
- 512.5 Eksport Hasil Industri
- 512.51 Kebijakan
- 512.52 Pemasaran
- 512.6 Pemberitahuan Eksport Barang
- 512.7 Pengawasan Mutu Barang
- 512.8 Eksportir Terdaftar
- 512.9 Evaluasi dan pelaporan
- 513 Impor
- 513.1 Ijin Impor
- 513.11 Pemberian ijin
- 513.12 Pengendalian ijin
- 513.2 Standart Mata Dagang Import
- 513.3 Management Perdagangan Internasional
- 513.4 Kegiatan Import

- 513.41 Pembinaan Import
- 513.42 Pengendalian Import
- 513.43 Pemantauan Import
- 513.5 Faktor-faktor Pendukung
- 513.6 Pengawasan mutu Barang Import
- 513.7 Penyaluran Kegiatan Import
- 513.71 Bahan Konsumsi
- 513.72 Bahan Baku
- 513.73 Bahan Penolong
- 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Imprt
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 514.1 Kerjasama Bahan baku
- 514.2 Industri Pemasaran
- 514.3 Kontrak
- 515 Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri
- 515.1 Promosi dan Informasi
- 515.2 Pameran
- 515.3 Kerjasama
- 516 Pergudangan , termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
- 516.1 Peti kemas
- 516.2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 KOPERASI**
- 518.1 Bina Usaha Koperasi
- 518.11 Koperasi Pertanian
- 518.12 Koperasi Non Pertanian
- 518.13 Permodalan Koperasi
- 518.131 Pemupukan Modal
- 518.132 Pemanfaatan Modal
- 518.133 Perbankan dan Asuransi
- 518.134 Permodalan Luar Koperasi
- 518.135 Kredit Program Umum
- 518.136 Kredit Program Khusus
- 518.14 Distribusi dan Jasa Koperasi
- 518.141 Distribusi Bahan Pokok
- 518.142 Distribusi Aneka Bahan
- 518.143 Distribusi Kerjasama Niaga
- 518.144 Jasa Angkutan
- 518.145 Jasa Perumahan
- 518.146 Aneka Jasa
- 518.15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
- 518.2 Bina Lembaga Koperasi
- 518.21 Organisasi Koperasi
- 518.211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
- 518.212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
- 518.213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi

- 518.214 Keragaan Koperasi
- 518.215 Pengakuan Koperasi Sekolah
- 518.216 Amalgamasi
- 518.217 Tertib Organisasi Koperasi
- 518.218 Penyelesaian Penyelesaian/ Persengketaan
- 518.219 Bimbingan Kesadaran Hukum
- 518.22 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
- 518.221 Rapat Anggota Tahunan Koperasi
- 518.222 Pengurus dan Badan Pemeriksa
- 518.223 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
- 518.224 Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
- 518.23 Bina Tata Laksana Koperasi
- 518.231 Klasifikasi Koperasi Pedesaan
- 518.232 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
- 518.233 Klasifikasi Koperasi Sekunder
- 518.24 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
- 518.241 Administrasi Koperasi Pedesaan
- 518.242 Administrasi Koperasi Perkotaan
- 518.243 Karyawan/ Maneger Koperasi
- 518.244 Sumber Daya Manusia
- 518.245 Tenaga Kerja Sukarela Terdidik(TKST)
- 518.246 Penyaluran Alat Sekolah
- 518.247 Bantuan Pemda Kepada Koperasi/ KUD
- 518.25 Akuntansi
- 518.251 Akuntansi Koperasi Pedesaan
- 518.252 Akuntansi Koperasi Perkotaan
- 518.253 Akuntansi Koperasi Sekunder
- 518.26 Pengawasan Koperasi
- 518.261 Pengawasan Koperasi Primer
- 518.262 Pengawasan Koperasi Sekunder
- 518.263 Koperasi Jasa Audit
- 518.264 Kerjasama Kantor Akuntansi
- 518.27 Penyuluhan Koperasi
- 581.271 Pembinaan Kader Koperasi
- 518.272 Masyarakat Umum
- 518.273 Forum Komunikasi
- 518.274 Kelompok Tani
- 518.275 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
- 518.276 Penilaian Tingkat Nasioanl
- 518.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 518.31 Pembinaan Usaha
- 518.311 Pembinaan Usaha Mikro
- 518.312 Pembinaan Usaha Kecil
- 518.313 Pembinaan Usaha Menengah
- 518.32 Pengawasan Usaha

- 518.321 Pengawasan Usaha Mikro
- 518.322 Pengawasan Usaha Kecil
- 518.323 Pengawasan Usaha Menengah
- 520 PERTANIAN**
- 521 Tanaman Pangan
 - 521.1 Rencana dan Program
 - 521.11 Bimas/ Inmas Termasuk Kredit
 - 521.12 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
 - 521.2 Produksi
 - 521.21 Padi
 - 521.22 Palawija
 - 521.23 Hortikultura (Sayuran,Buah-Buahan,Tanaman Hias)
 - 521.24 Panen Gagal (Puso)
 - 521.3 Sarana Usaha Pertanian
 - 521.31 Peralatan
 - 521.32 Meliputi Traktor dan Sebagainya
 - 521.33 Pembenihan dan Pembibitan
 - 521.34 Pupuk
 - 521.35 Irigasi Pertanian
 - 521.36 Rehabilitasi Lahan Pertanian
 - 521.4 Perlindungan Tanaman
 - 521.41 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
 - 521.411 Penyakit Tanaman Pangan
 - 521.412 Hama Tanaman Pangan
 - 521.42 Pemberantas
 - 521.421 Pestisida
 - 521.422 Agensia Pengendalian Hayati
 - 521.43 Tanah Pertanian Pangan
 - 521.431 Persawahan
 - 521.432 Perladangan
 - 521.433 Kebun
 - 521.5 Pengusaha, Petani
 - 521.6 Lahan Kritis
 - 521.7 Pemasaran dan Promosi Pertanian
 - 521.8 Pengembangan Sumber Daya Pertanian
- 522 Kehutanan
 - 522.1 Perencanaan Hutan
 - 522.11 Survey
 - 522.111 Survey PPA
 - 522.112 Survey Areal
 - 522.113 Survey Pembinaan Hutan
 - 522.114 Survey Potensi Hutan
 - 522.12 Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan
 - 522.121 Data Areal Tata Guna Hutan
 - 522.122 Data Areal Konservasi
 - 522.2 Tata Guna Hutan

- 522.21 Tata Ruang Kawasan
- 522.211 Pengurusan Kawasan Hutan
- 522.212 Penafsiran Hutan
- 522.213 Mutasi Hutan
- 522.22 Tata Hutan
- 522.221 Tata Hutan Sementara
- 522.222 Tata Hutan Tetap
- 522.223 Pembukaan Hutan
- 522.23 Pengukuran dan Pemetaan
- 522.3 Pengusahaan Hutan
- 522.31 Data Areal HPH
- 522.311 SK HPH
- 522.312 Kerja Sama
- 522.313 Pembatalan/ Penolakan
- 522.32 Modal dan Peralatan
- 522.321 Inventarisasi Logging
- 522.322 Inventarisasi Industri
- 522.323 Peralatan
- 522.324 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
- 522.325 Pemegang Saham
- 522.32.6 Neraca Perusahaan
- 522.33 Rencana Kerja
- 522.331 KHPH
- 522.332 RKPH
- 522.34 Perpanjangan HPH
- 522.35 Produksi
- 522.351 Target Produksi
- 522.352 Produksi Kayu
- 522.353 Industri Non- Kayu
- 522.36 Industri
- 522.361 Industri Kayu HPH
- 522.362 Industri Kayu Non-HPH
- 522.363 Industri Non Kayu
- 522.37 Pembinaan HPH
- 522.371 Pelanggaran dan Sanksi
- 522.38 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
- 522.381 Hutan Tanaman Industri Pulp
- 522.382 HTI Pertukaran
- 522.39 Iuran Hutan
- 522.4 Sarana Usaha
- 522.41 Standarisasi
- 522.411 Kayu
- 522.412 Non Kayu
- 522.42 Pengujian Hasil Hutan
- 522.43 Pengembangan
- 522.431 Pengembangan Perusahaan

- 522.432 Pengembangan Pemasaran
- 522.44 Pemasaran Hasil Hutan
- 522.45 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
- 522.451 Sarana dan Prasarana
- 522.452 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
- 522.46 Tata Usaha Hasil Hutan
- 522.47 PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
- 522.5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
- 522.51 Konservasi Jenis
 - 522.511 Satwa yang Dilindungi
 - 522.512 Satwa yang Tidak Dilindungi
 - 522.513 Lembaga Konservasi Satwa
 - 522.514 Lembaga Konservasi Tumbuhan
- 522.52 Kawasan Konservasi
 - 522.521 Cagar Alam (termasuk laut)
 - 522.522 Suaka Margasatwa
 - 522.523 Taman Wisata (termasuk laut)
 - 522.524 Taman Nasional
- 522.525 Taman hutan Raya / Kebun Raya
- 522.526 Taman Baru
- 522.527 Hutan Lindung
- 522.53 Pengkajian Lingkungan
 - 522.531 Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan
 - 522.532 Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
- 522.54 Bina Cinta Alam
 - 522.541 Kelompok Pecinta Alam
 - 522.542 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
 - 522.543 Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 522.544 LSM Lingkungan
- 522.55 Pengamanan Hutan
 - 522.551 Jaga Wana
 - 522.552 PPNS
 - 522.553 Gangguan Keamanan Hutan
 - 522.554 Bencana Alam
 - 522.555 Kebakaran Hutan
 - 522.556 Sengketa Hutan
 - 522.557 Hama dan Penyakit
 - 522.558 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
 - 522.559 Alat dan Mesin Kehutanan
- 522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
 - 522.61 Pembenihan
 - 522.611 Tegakan Benih
 - 522.612 Pengadaan Benih
 - 522.613 Pengujian dan Penyimpanan Benih

- 522.614 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 522.615 Pembibitan
- 522.616 Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
- 522.617 Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
- 522.62 Tanaman Reboisasi
- 522.621 Lahan Kritis
- 522.622 Reboisasi Lahan HPH
- 522.623 Rehabilitasi Tanah Hutan
- 522.624 Konservasi Tanah dan Air
- 522.625 Pengendalian Perladangan
- 522.626 Penghijauan
- 522.627 Aneka Usaha Kehutanan
- 522.63 Perhutanan Sosial
- 522.631 Sutera Alam
- 522.632 Minyak Kayu Putih
- 522.633 Perlebahan
- 522.7 Hutan Produksi
- 522.71 Hutan Produksi Terbatas
- 522.72 Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi
- 522.8 Kawasan Lindung
- 523 Perikanan dan Kelautan
- 523.1 Rencana,Program,Stastistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
- 523.11 Penyuluhan
- 523.12 Teknologi
- 523.2 Produksi Perikanan
- 523.21 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
- 523.22 Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
- 523.23 Sertifikasi Kesehatan ikan
- 523.3 Usaha Perikanan
- 523.31 Pelatihan Nelayan
- 523.32 Pembinaan Wanita Nelayan
- 523.33 Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI , SKP
- 523.34 Perbenihan
- 523.4 Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
- 523.41 Ekspor Hasil Perikanan
- 523.42 Impor Hasil Perikanan
- 523.43 Pemasaran Dalam Negeri
- 523.44 Pengusaha perikanan
- 523.5 Sarana perikanan
- 523.51 Pelabuhan Perikanan Pantai
- 523.52 TPI/PPI
- 523.53 Kesyahbandaran
- 523.54 Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb
- 523.6 Pengendalian hama dan penyakit
- 523.61 Penyakit ikan

- 523.62 Hama ikan
- 523.63 Obat-obatan termasuk sertifikasinya
- 523.7 Konservasi dan Suaka Laut
- 523.71 Transplantasi bibit karang
- 523.72 Terumbu karang
- 523.73 Mangrove
- 523.74 Garam
- 523.75 Harta karun di dalam laut
- 523.76 Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir
- 524 Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 524.1 Produksi
- 524.11 Perbibitan
- 524.12 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
- 524.13 Budidaya
- 524.2 Usaha Peternakan
- 524.21 Pelayanan Usaha
- 524.22 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 524.23 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
- 524.3 Kesehatan Hewan
- 524.31 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
- 524.32 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- 524.33 Obat-obatan Hewan
- 524.34 Pelayanan Kesehatan Hewan
- 524.4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 524.41 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
- 524.42 Hygieni dan Sanitasi
- 524.43 Produk Hewani
- 524.5 Laboratorium Kesehatan Hewan
- 524.51 Pengujian Mutu Asal Hewan
- 524.52 Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
- 524.6 Inseminasi Buatan
- 524.61 Produksi Distribusi dan Pemasaran
- 524.62 Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
- 524.7 Pembibitan dan Budi Daya Ternak
- 524.71 Ternak Non Ruminansia
- 524.72 Ternak Ruminansia
- 525 PERKEBUNAN**
- 525.1 Program dan Pelaporan
- 525.11 Pelaporan
- 525.12 Monitoring
- 525.13 Statistik Perkebunan
- 525.2 Produksi
- 525.21 Karet
- 525.22 T e h
- 525.23 Tembakau
- 525.24 Tebu

- 525.25 Cengkeh
- 525.26 Kelapa/Kopra/Kelapa sawit
- 525.27 Kopi
- 525.28 Kakao
- 525.29 Jenis Tanaman yang lain
- 525.3 Usaha Perkebunan
 - 525.31 Benih
 - 525.32 Pembibitan
 - 525.33 Kelompok tani
 - 525.34 Kemitraan
 - 525.35 Rekomendasi ijin usaha perkebunan
 - 525.36 Pemasaran Hasil Perkebunan
- 525.4 Perlindungan Tanaman
 - 525.41 Hama
 - 525.42 Pestisida
 - 525.43 Agensia Pengendalian Hayati
- 525.5 Alat dan Mesin Perkebunan
 - 525.51 Power Sprayer
 - 525.52 Hand Sprayer
 - 525.53 Polibag
 - 525.54 Alat Laboratorium Perkebunan
 - 525.55 Reagen
 - 525.56 Sarana/Alat Produksi Perkebunan
- 525.6 Pengolahan lahan
 - 525.61 Terasering
- 525.7 Pemasarakatan
 - 525.71 Penyuluhan
 - 525.72 Sosialisasi
 - 525.73 Informasi
- 526 Ketahanan Pangan
 - 526.1 Program Bimbingan Massal
 - 526.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - 526.21 Pembinaan Teknologi
 - 526.22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - 526.23 Kelembagaan
 - 526.3 Agribisnis
 - 526.31 Mutu Hasil
 - 526.32 Pengelola Hasil Lahan
 - 526.33 Kemitraan
 - 526.34 Pemasaran Hasil
 - 526.4 Distribusi Pangan
 - 526.41 Sistem dan pola Distribusi
 - 526.42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 - 526.43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 - 526.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 - 526.51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan

- 526.52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
- 526.53 Sistem Informasi Pangan
- 527 **PENYULUHAN****
- 527.1 Sumber Daya Manusia
- 527.11 Penyuluh
- 527.12 Pelaku Utama Pelaku Usaha
- 527.13 Stake holder
- 527.2 Kelembagaan
- 527.21 Struktural
- 527.22 Non Struktural
- 527.23 Pelaku Utama Pelaku Usaha
- 527.24 Lembaga Profesi
- 527.3 Penyelenggaraan Penyuluhan
- 527.31 Program/Metode
- 527.32 Promosi/Pameran/Kampanye
- 527.33 Penghargaan/Lomba
- 527.34 Materi
- 530 **PERINDUSTRIAN****
- 530.1 Undang-undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
- 536.1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
- 537.1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara
- 538.1 Perjan
- 538.2 Perum
- 538.3 Persero
- 539 Perusahaan Daerah
- 540 **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL****
- 541 Minyak dan Gas Bumi
- 541.1 Pengusahaan
- 541.11 Perijinan
- 541.12 Rekomendasi
- 541.13 Kontrak Karya
- 541.14 Pengolahan
- 541.2 Penyaluran
- 541.3 Tangki, Pompa, Tanker
- 542 Energi
- 542.1 Energi alternatif
- 542.11 Gas Rawa
- 542.12 Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

- 542.13 Biogas
- 542.14 Energi baru terbarukan
- 542.15 Perijinan
- 542.16 Rekomendasi
- 542.17 Pembinaan dan Pengawasan
- 542.2 Konservasi Energi
- 542.3 Pemetaan Energi
- 542.4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
- 543 Pertambangan, mineral dan batubara
 - 543.1 Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
 - 543.11 WIUP Batuan
 - 543.12 WIUP Bukan Logam
 - 543.13 WIUP Logam
 - 543.14 WIUP Batubara
 - 543.2 Rekomendasi Teknis
 - 543.3 Perijinan
 - 543.31 IUP Eksplorasi
 - 543.32 IUP Operasi Produksi
 - 543.33 IUP Operasi Produksi Khusus
 - 543.34 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
 - 543.35 Pencabutan Ijin
 - 543.4 Pembinaan
 - 543.5 Pengawasan
 - 543.51 Pengawasan Usaha Pertambangan
 - 543.52 Penerbitan Kegiatan Pertambangan
 - 543.6 Pasca Tambang
 - 543.61 Reklamasi
 - 543.62 Penutupan
- 544 Air tanah
 - 544.1 Cekungan Air Tanah (CAT)
 - 544.11 Pemetaan CAT
 - 544.12 Imbuhan CAT
 - 544.13 Lepasana CAT
 - 544.14 Konservasi
 - 544.15 Pengendalian Daya Rusak
 - 544.2 Rekomendasi Teknis
 - 544.3 Sumur Artesis
 - 544.4 Sumur Bor
 - 544.5 Sumur Gali (Pasak)
 - 544.6 Pengusaha Pengebor (APATINDO)
 - 544.7 Sumur Pantau
 - 544.8 Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
 - 544.9 Hidrologi
- 545 Geologi
 - 545.1 Pemetaan
 - 545.2 Mitigasi Bencana Geologi

- 545.3 Vulkanologi
- 545.31 Pengawasan Vulkanologi
- 545.32 Panas Bumi
- 545.4 Hidrogeologi
- 545.5 Gerakan Tanah (Longsor, amblesan)
- 545.6 Pengawasan, pengendalian
- 546 Hidrologi
- 547 Kesamudraan
- 548 Penghematan Energi
- 550 PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
- 551.1 Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
- 551.11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
- 551.12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
- 551.13 Kecelakaan Lalu Lintas
- 551.2 Angkutan Jalan Raya
- 551.21 Perizinan
- 551.22 Terminal
- 551.23 Alat Angkutan
- 551.24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
- 551.25 Uji Mutu
- 551.3 Angkutan Sungai
- 551.31 Keselamatan, Rambu-rambu
- 551.32 Lalu Lintas
- 551.33 Alur dan Kolam Pelabuhan
- 551.34 Trayek
- 551.35 Sarana/Kapal
- 551.36 Pelabuhan
- 551.37 Terminal
- 551.38 Kecelakaan
- 551.39 Perizinan
- 551.4 Angkutan Danau
- 551.41 Keselamatan, Rambu-rambu
- 551.42 Lalu Lintas
- 551.43 Alur dan Kolam Pelabuhan
- 551.44 Trayek
- 551.45 Sarana/Kapal
- 551.46 Pelabuhan
- 551.47 Terminal
- 551.48 Kecelakaan
- 551.49 Perizinan
- 551.5 Perkereta-Apian
- 551.51 Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
- 551.52 Prasarana (Jalan/Jembatan)
- 551.53 Trayek
- 551.54 Angkutan Penumpang

551.55	Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/Perbaikan
551.59	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran Charter/Wisata Turis
552.15	Pelayaran Khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
552.2	Perkapalan-Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton/Tongkang
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan
552.31	Tanah/Lokasi
552.32	Alur Layar
552.33	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan/Gedung/Gudang
552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
552.4	Pengerukan/Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	Pos
552.62	Minyak

552.63 L o g
552.64 Ternak
552.65 Sembilan Bahan Pokok
552.66 Peti Kemas / EMKL
552.67 Muatan Umum
552.68 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69 Bongkar Muatan
552.7 Keselamatan
552.71 Rambu-rambu/Mercu suar
552.72 Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
552.73 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
552.74 Telekomunikasi Pelayaran
552.75 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
552.76 Sertifikasi Awak Kapal
552.8 Kecelakaan, Gangguan
552.81 Kecelakaan Penumpang/Kapal
552.82 Kecelakaan Barang
552.83 Gangguan Sarana/Prasarana
552.84 Pembajakan/Penyeludupan
552.85 Pencemaran
552.9 Perijinan
552.91 Ijin Berlayar
552.92 Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94 Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.95 Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97 Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553 Perhubungan Udara
553.1 Lalu Lintas Angkutan Udara
553.11 Penerbangan Domestik
553.12 Penerbangan Luar Negeri
553.13 Penerbangan Haji
553.14 Penerbangan Charter/Non Reguler
553.15 Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
553.2 Pelabuhan Udara
553.21 Tanah/Lokasi
553.22 Landasan
553.23 Apron
553.24 Terminal Penumpang
553.25 Terminal Cargo
553.26 Bangunan/Gedung
553.27 Perlengkapan
553.28 Parkir Kendaraan

- 553.3 Alat Angkutan
- 553.31 Pesawat Udara
- 553.32 Helikopter
- 553.4 Angkutan Barang
- 553.41 P o s
- 553.42 Muatan Dalam Negeri
- 553.43 Muatan Luar Negeri
- 553.44 EMPU
- 553.5 Sertifikasi Kelaikan
- 553.51 Kelaikan Pesawat Udara
- 553.52 Kelaikan Peralatan Penunjang
- 553.53 Kelaikan Personil/Awak Kapal
- 553.6 Keselamatan
- 553.61 Rambu-rambu
- 553.62 Perakitan/Kalibrasi
- 553.63 Fasilitas Keselamatan
- 553.64 Telekomunikasi Penerbangan
- 553.7 Kecelakaan/Gangguan
- 553.71 Kecelakaan Penumpang
- 553.72 Kecelakaan Barang
- 553.73 Gangguan Sarana/Prasarana
- 553.74 Pembajakan
- 553.75 Pencemaran
- 553.8 Umum
- 553.81 Asuransi
- 553.82 Asosiasi
- 553.83 SATPAM
- 553.84 Rally Udara/Lomba
- 553.9 Perizinan
- 553.91 Izin Terbang/Flight Approval
- 553.92 Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
- 553.93 Pembukaan Kantor Cabang
- 553.94 Rekomendasi Ketinggian Bangunan
- 553.95 Pembangunan Bandar Udara Khusus
- 554 POS**
- 554.1 Pembinaan
- 554.11 Kebutuhan fasilitas
- 554.12 Rehabilitasi/Perawatan
- 554.13 Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan
- 554.14 Standarisasi Perangkat
- 554.15 Tanah/Bangunan
- 554.16 Filateli
- 554.17 Asosiasi
- 554.18 Laporan dan Evaluasi
- 554.2 Pelayanan
- 554.21 Jasa pos

- 554.22 Jasa titipan
- 554.23 Jasa giro
- 554.24 Benda pos/perangko
- 554.25 Sampul peringatan
- 554.26 Jasa pos Elektronik
- 554.3 Perijinan
- 554.31 Rekomendasi usaha Jasa pos/Titipan
- 554.32 Pembukaan Agen/Cabang
- 554.4 Gangguan Sarana dan Prasarana
- 554.41 Kecelakaan
- 554.42 Sabotase
- 554.43 Penyeludupan
- 555 **Teknologi Informasi****
- 555.1 Kebijakan
- 555.2 Peralatan
- 555.21 Telepon
- 555.22 Internet/USO
- 555.23 Telegram, Telex/SBB,Faximile
- 555.24 Satelit,Stasiun Bumi
- 555.25 Radio Kumunikasi
- 555.3 Sistem
- 555.4 Pembinaan /Penertiban
- 555.5 Perijinan
- 556 **Pariwisata dan Rekreasi****
- 556.1 Usaha Pariwisata
- 556.11 Usaha Jasa Pariwisata
- 556.111 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
- 556.112 Restoran dan Rumah Makan
- 556.12 Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
- 556.13 Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556.14 Usaha Sarana Pariwisata
- 556.141 Ijin Pariwisata
- 556.142 Ijin Usaha Pariwasata
- 556.143 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
- 556.144 Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata
- 556.145 Ijin Usaha Sarana
- 556.15 Wisatawan
- 556.151 Wisatawan Nusantara
- 556.152 Wisatawan Mancanegara
- 556.16 Promosi dan Informasi Pariwisata
- 556.161 Dalam Negeri
- 556.162 Luar Negeri
- 556.2 Perhotelan
- 556.21 Status Hotel
- 556.22 Kelas Hotel
- 556.23 Tarif

- 556.3 Travel Service
- 556.31 Pramu Wisata
- 556.32 Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
- 556.33 Souvenir
- 556.34 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
- 556.4 Tempat Rekreasi
- 556.41 Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556.411 Ciptaan Tuhan
- 556.412 Hasil Karya Manusia
- 556.42 Rehabilitasi / Perawatan
- 556.43 Pengembangan Fasilitas
- 556.44 Tanah / Bangunan
- 556.45 Bina Usaha
- 556.46 Institusi
- 556.461 Asosiasi
- 556.462 Lembaga kepariwisataan
- 557 Metereologi**
- 557.1 Curah Hujan
- 557.2 Hujan Buatan
- 557.3 Peneropongan Bintang
- 560 TENAGA KERJA**
- 560.1 Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
- 560.11 Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
- 560.2 Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
- 560.3 Rekrutmen Calon TKI / TKW
- 560.4 Seleksi Naker Ke Luar Negeri
- 560.41 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
- 560.42 Berkas Persyaratan Calon TKI /TKW
- 560.43 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
- 560.5 Persyaratan Naker TKI / TKW
- 560.51 Permohonan Rekomendasi Passport
- 560.52 Perjanjian Kerja TKI/TKW
- 560.53 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
- 560.54 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
- 560.55 Pelatihan TKI/TKW
- 560.6 Pemberangkatan Naker
- 560.61 Pemberangkatan ke Luar Negeri
- 560.62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
- 560.63 Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
- 560.7 Pemulangan Naker
- 560.71 Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
- 560.72 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
- 560.73 TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
- 561 Upah
- 561.1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional

- 561.2 Pemohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi
- 561.3 Kebutuhan Fisik Minuman
- 561.4 Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
- 561.5 Laporan Data Remittance
- 561.6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
- 562 Penempatan
- 562.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
- 562.11 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
- 562.12 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
- 562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja
- 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama
- 562.3 Lembaga Penyalur Naker
- 562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah Dan Antar Kerja Negara (AKAN)
- 562.32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
- 562.33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Latihan Kerja
- 563.1 Pendidikan Pekerja
- 563.11 Pendidikan dan Latihan Kerja
- 563.12 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
- 563.13 Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
- 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
- 563.21 Tempat Pelatihan (BLK)
- 563.22 Instruktur/Pelatihan
- 563.23 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
- 563.24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
- 563.25 Sertifikat
- 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
- 564.1 Butsi
- 564.2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Pekerja
- 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
- 565.11 Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER
- 565.12 Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
- 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER
- 565.14 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
- 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
- 565.16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
- 565.17 Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
- 565.18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)
- 565.2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja

- 566 Keselamatan Kerja
- 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- 566.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
- 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 566.5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
- 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
- 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
- 566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
- 566.82 Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
- 566.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 566.84 Pemasangan dan Pemakaian tangki tak bertekanan
- 566.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
- 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (shifht malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 567.1 Pengaduan PHK sepihak
- 567.2 PHK massal
- 567.3 Bantuan hukum bagi pekerja yang di PHK
- 567.4 Ijin melakukan PHK
- 567.5 Perhitungan masa kerja bagi pekerja yang di PHK
- 567.6 Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
- 567.7 Pemberian uang pesangon bagi pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja
- 568.1 Bantuan Kredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
- 568.11 Pemilihan Pekerja Teladan
- 568.2 Perumahan Pekerja
- 568.3 Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
- 568.4 Koperasi Pekerja
- 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
- 568.6 Perpustakaan Pekerja
- 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
- 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
- 568.91 Lembaga Kerjasama Bipartid
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
- 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- 569.4 Perjanjian Kerja Dengan Tenaga Asing
- 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
- 569.6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
- 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
- 569.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 PENANAMAN MODAL

- 570.1 Penanaman Modal Dalam Negeri
- 570.2 Penanaman Modal Asing
- 571 Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
- 572 Pasar Uang dan Modal
- 573 Saham

580 PERBANKAN MONETER

- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Tabungan
 - 583.1 Deposito
 - 583.2 Tabanas
 - 583.3 Taska
 - 583.4 Tapelpram
- 584 Bank Pembangunan Daerah
 - 584.1 Bank Kaltim
 - 584.2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar
- 585 Asuransi
 - 585.1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
 - 585.2 Polis
 - 585.3 Premi
 - 585.4 Tertanggung/Pemegang Polis
 - 585.5 Uang Pertanggungan
- 586 Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
- 587 Fiscal
- 588 Hutang Negara Obligasi
- 589 Moneter

590 AGRARIA

- 591 Tata Guna Tanah
 - 591.1 Pemetaan dan Pengukuran
 - 591.2 Perpetaan
 - 591.3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
 - 591.4 Fakta Tata Guna Tanah
 - 591.5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - 592.1 Redistribusi
 - 592.11 Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
 - 592.12 Penentuan Tanah Objek Landreform
 - 592.13 Pembagian Tanah Landreform
 - 592.14 Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
 - 592.2 Ganti Rugi
 - 592.21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - 592.22 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - 592.23 Ganti Rugi Tanah Absentee
 - 592.24 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
 - 592.25 Ganti Rugi Tanah Partikelir

- 592.26 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
- 592.3 Bagi Hasil
- 592.31 Penetapan Imbangan Gadai Tanah
- 592.32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
- 592.33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
- 592.4 Gadai Tanah
- 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah
- 592.42 Pelaksanaan Gadai Tanah
- 592.43 Sengketa Gadai Tanah
- 592.5 Bimbingan dan Penyuluhan
- 592.6 Pengembangan
- 592.7 Yayasan Dana Landreform (YDL)
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
- 593.1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
- 593.11 Sewa Tanah
- 593.12 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu :
Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus.
- 593.2 Hak Milik
- 593.21 Perorangan
- 593.22 Badan Hukum
- 593.3 Hak Pakai
- 593.31 Perorangan
- 593.311 Warga Negara Indonesia
- 593.312 Warga Negara Asing
- 593.32 Badan Hukum
- 593.321 Badan Hukum Indonesia
- 593.322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang
Asing
- 593.33 Tanah Gedung-Gedung Negeri
- 593.4 Guna Usaha
- 593.41 Perkebunan Besar
- 593.42 Perkebunan Rakyat
- 593.43 Peternakan
- 593.44 Perikanan
- 593.45 Kehutanan
- 593.5 Hak Guna Bangunan
- 593.51 Perorangan
- 593.52 Badan Hukum
- 593.53 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
- 593.54 Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5 / 56
- 593.55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
- 593.6 Hak Pengelolaan
- 593.61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
- 593.62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- 593.7 Sengketa Tanah
- 593.71 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)

- 593.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- 593.81 Pencabutan Hak
- 593.82 Pembebasan Tanah
- 593.83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
- 594.1 Pengukuran/ Pemetaan
- 594.11 Fotogrametri
- 594.12 Terristris
- 594.13 Triangulasi
- 594.14 Peralatan
- 594.2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1960)
- 594.3 Sertifikat
- 594.4 Pejabat Pembuatan Akte Tanah
- 595 Transmigrasi
- 595.1 Tata Guna Tanah
- 595.2 Landreform
- 595.3 Pengurusan Hak-hak Tanah
- 595.4 Pendaftaran Tanah
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**
- 601 -
- 602 -
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
- 604.1 Tanah dan Batu
- 604.2 Aspal
- 604.3 Besi dan Logam Lainnya
- 604.31 Besi Beton
- 604.32 Besi Profil (Konstruksi)
- 604.33 Paku
- 604.34 Alumunium Profil
- 604.4 Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet Kayu)
- 604.5 Semen
- 604.6 Kayu
- 604.7 Bahan Penutup Atap
- 604.8 Alat Alat Penggantung dan Pengunci
- 604.9 Bahan Bahan Bangunan Lainnya
- 605 I n s t a l a n s i
- 605.1 Instalansi Bangunan
- 605.2 Instalansi Listrik
- 605.3 Instalansi Air / Sanitasi
- 605.4 Instalansi Pengatur Udara
- 605.5 Instalansi Akustik
- 605.6 Instalansi Cahaya / Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
- 606.1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran

- 606.2 Terhadap Gempa
- 606.3 Terhadap Angin / Udara / Panas
- 606.4 Terhadap Kegaduhan
- 606.5 Terhadap Gas / Explosive
- 606.6 Terhadap Serangga
- 606.7 Terhadap Radiasi Atom
- 610 P E N G A I R A N**
- 611 Irigasi
 - 611.1 Bangunan Waduk
 - 611.11 Bendungan
 - 611.12 Tanggul
 - 611.13 Pelimpahan banjir
 - 611.14 Menara pengambilan
 - 611.15 Pembangunan dermaga
 - 611.2 Bangunan pengambilan
 - 611.21 Bendungan
 - 611.22 Bendungan dengan pintu bilas
 - 611.23 Bendungan dengan pompa
 - 611.24 Pengambilan bebas
 - 611.25 Pengambilan bebas dengan pompa
 - 611.26 Sumur dengan pompa
 - 611.27 Kantung lumpur
 - 611.28 Silf ekstretor
 - 611.29 Escape chenel
 - 611.3 Bangunan pembawa
 - 611.31 Saluran
 - 611.311 Saluran Induk
 - 611.312 Saluran sekunder
 - 611.313 Suplesi
 - 611.314 Tersier
 - 611.315 Saluran kwarter
 - 611.316 Saluran pasangan
 - 611.317 Saluran tertutup/terowongan
 - 611.32 Bangunan
 - 611.321 Bangunan bagi
 - 611.322 Bangunan dan sadap
 - 611.323 Bangunan sadap
 - 611.324 Bangunan check
 - 611.325 Bangunan terjun
 - 611.33 Bax Tersier
 - 611.34 Got miring
 - 611.35 Talang
 - 611.36 Syphon
 - 611.37 Gorong-gorong
 - 611.38 Pelimpahan samping
 - 611.4 Bangunan Pembuangan

- 611.41 Saluran
 - 611.411 Saluran Pembuangan induk
 - 611.412 Saluran Pembuangan sekunder
 - 611.413 Saluran Pembuangan tersier
- 611.42 Bangunan
 - 611.421 Bangunan out let
 - 611.422 Bangunan terjun
 - 611.423 Bangunan penahan banjir
- 611.43 Gorong-gorong pembuangan
- 611.44 Talang pembuang
- 611.45 Syphon pembuangan
- 611.5 Bangunan lainnya
 - 611.51 Jalan
 - 611.511 Jalan Inspeksi
 - 611.512 Jalan Logistik
 - 611.52 Jembatan
 - 611.521 Jembatan Inspeksi
 - 611.522 Jembatan Hewan
 - 611.53 Tangga Cuci
 - 611.54 Kubangan Kerbau
 - 611.55 Waduk Lapangan
 - 611.56 Bangunan Penunjang
 - 611.57 Jaringan Telepon
 - 611.58 Stasiun Argo
 - 611.59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
- 612 Polder
 - 612.1 Tangul Keliling
 - 612.11 Tanggul
 - 612.12 Bangunan Penutup Sungai
 - 612.13 Jembatan
 - 612.2 Bangunan Pembawa
 - 612.21 Saluran
 - 612.211 Saluran Muka
 - 612.212 Saluran Pembawa Induk
 - 612.213 Saluran Pembawa Sekunder
 - 612.214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
 - 612.22 Bangunan Bagi:
 - 612.221 Gorong-Gorong
 - 612.222 Syphon
 - 612.3 Bangunan Pembuangan
 - 612.31 Stasiun Pompa Pembuangan
 - 612.32 Saluran
 - 612.321 Saluran Pembawa Induk
 - 612.322 Saluran Pembawa Sekunder
 - 612.33 Pintu Air Pembuangan
 - 612.34 Gorong-gorong Pembuangan

612.35 Syphon Pembuangan
612.4 Bangunan Lainnya
612.41 Bangunan
612.411 Bangunan Pengukur Air
612.412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42 Rumah Petugas Eksploitasi
613 Pasang Surut
613.1 Bangunan Pembawa
613.11 Saluran Pembawa Induk
613.12 Saluran Pembawa Sekunder
613.13 Saluran Pembawa Tersier
613.14 Saluran Penyimpanan Air
613.15 Saluran Pintu Pembuangan
613.2 Bangunan Pembuangan
613.21 Saluran Pembawa Induk
613.22 Saluran Pembawa Sekunder
613.23 Saluran Pembawa Tersier
613.24 Saluran Penyimpanan Air
613.25 Saluran Pintu Pembuangan
613.3 Bangunan Lainnya
613.31 Kolom Pasang
613.32 Saluran
613.321 Saluran Lalu Lintas
613.322 Saluran Muka
613.33 Bangunan
613.331 Bangunan Penangkis Kotoran
613.332 Bangunan Pengukur Muka Air
613.333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34 Jalan
613.35 Jembatan
614 Pengendalian Sungai
614.1 Bangunan Pengaman
614.11 Tanggul Banjir
614.12 Pintu Pengatur Banjir
614.13 Klep Pengatur Banjir
614.14 Tembok Pengaman Talut
614.15 Krib
614.16 Kantung Lumpur
614.17 Check Dam
614.18 Syphon
614.2 Saluran Pengaman
614.21 Saluran Banjir
614.22 Saluran Drainage
614.23 Corepure

- 614.3 Bangunan Lainnya
- 614.31 Warning System
- 614.32 Stasiun
- 614.321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- 614.322 Stasiun Pengukur Air
- 614.323 Stasiun Pengukur Cuaca
- 614.324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
- 615.1 Tanggul
- 615.2 Krib
- 615.3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
- 616.1 Stasiun Pompa
- 616.2 Bangunan Pembawa
- 616.3 Bangunan Pembuangan
- 616.4 Bangunan Lainnya
- 620 JALAN**
- 621 Jalan Kota / Kabupaten
- 621.1 Daerah Penguasaan
- 621.11 Tanah
- 621.12 Tanaman
- 621.13 Bangunan
- 621.2 Bangunan Sementara
- 621.21 Jalan Sementara
- 621.22 Kantor Proyek
- 621.23 Gedung Proyek
- 621.24 Barak Kerja
- 621.25 Laboratorium Lapangan
- 621.26 Rumah
- 621.3 Badan Jalan
- 621.31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- 621.32 Stabilisasi
- 621.4 Perkerasan
- 621.41 Lapisan Pondasi Bawah
- 621.42 Lapisan Pondasi
- 621.43 Lapisan Permukaan
- 621.5 Drainage
- 621.51 Parit Tanah
- 621.52 Gorong –Gorong (Culvert)
- 621.6 Buku Trotoir
- 621.61 Tanah
- 621.62 Perkerasan
- 621.63 Pasangan
- 621.7 Medium
- 621.71 Tanah
- 621.72 Tanaman

621.73 Perkerasan
621.74 Pasangan
621.8 Daerah Sampingan
621.81 Tanaman
621.82 Pagar
621.9 Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
621.91 Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92 Lampu Penerangan
621.93 Lampu Pengaturan Lalu Lintas
621.94 Patok-patok KM
621.95 Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96 Rel Pengamanan
621.97 Pagar
621.98 Turap Penahan
621.99 Bronjong
622 Jalan Provinsi
622.1 Daerah Penguasaan
622.11 Tanah
622.12 Tanaman
622.13 Bangunan
622.14 Jalan Sementara
622.15 Jembatan Sementara
622.16 Kantor/ Gedung Proyek
622.17 Barak Kerja
622.18 Laboraturium Lapangan
622.19 Rumah
622.2 Badan Jalan
622.21 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
622.22 Stabilisasi
622.3 Perkerasan (Pavement)
622.31 Lapis Pondasi Bawah
622.32 Lapis Pondasi
622.33 Lapis Permukaan
622.4 Drainage
622.41 Parit
622.42 Gorong-gorong (culvert)
622.43 Buku Trotoir
622.44 Tanah
622.45 Perkerasan
622.5 Trotoir
622.51 Tanah
622.52 Perkerasan
622.6 Medium
622.61 Tanah
622.62 Tanaman
622.63 Perkerasan

- 622.64 Pasangan
- 622.7 Daerah samping
- 622.71 Tanaman
- 622.72 Pagar
- 622.8 Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
- 622.81 Rambu-rambu
- 622.82 Lampu penerbangan
- 622.83 Lampu Pengatur lalu lintas
- 622.84 Patok-patok KM
- 622.85 Patok-patok R, O, W (Sempadan)
- 622.86 Rel pengamanan
- 622.87 Pagar
- 622.88 Turap penahan
- 622.89 Bronjong
- 633 Jalan Nasional
- 633.1 Daerah penguasaan
- 633.2 Badan jalan
- 633.3 Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
- 633.4 Drainase (gorong-gorong, parit)
- 633.5 Median
- 633.6 Daerah samping (pagar, tanaman)
- 633.7 Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)

630 JEMBATAN

- 631 Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
- 631.1 Daerah penguasaan
- 631.11 Tanah
- 631.12 Tanaman
- 631.13 Bangunan
- 631.2 Bangunan sementara
- 631.21 Jalan sementara
- 631.22 Jembatan sementara
- 631.23 Kantor proyek
- 631.24 Gedung proyek
- 631.25 Barak kerja
- 631.26 Laboratorium lapangan
- 631.27 Rumah
- 631.3 Pekerjaan Tanah (earth work)
- 631.31 Galian tanah
- 631.32 Timbunan tanah
- 631.4 Pondasi
- 631.41 Pondasi kepala jembatan
- 631.42 Pondasi Pilar
- 631.43 Pondasi angker
- 631.5 Bangunan bawah
- 631.51 Kepala jembatan
- 631.52 Pilar

631.53 Pilon
631.54 Landasan
631.6 Bangunan
631.61 Gelagar
631.62 Lantai
631.63 Perkerasan
631.64 Jalan orang/trotoir
631.65 Sandaran
631.66 Talang air
631.7 Bangunan pengaman
631.71 Turap/penahan
631.72 Bronjong
631.73 Strek Dam
631.74 Kist Dam
631.75 Coupute
631.76 Krip
631.8 Bangunan pelengkap
631.81 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
631.82 Patok pengamanan
631.83 Patok R, O, W (Sempadan)
631.9 Oprit
631.91 Badan
631.92 Perkerasan
631.93 Drainage
631.94 Baku
631.95 Mediun
632 Jembatan pada jalan Provinsi
632.1 Daerah Penguasaan
632.11 Tanah
632.12 Tanaman
632.13 Bangunan
632.2 Bangunan sementara
632.21 Jalan sementara
632.22 Jembatan sementara
632.23 Kantor proyek
632.24 Gedung proyek
632.25 Barak kerja
632.26 Laboratorium lapangan
632.27 Rumah
632.3 Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31 Galian tanah
632.32 Timbunan tanah
632.4 Pondasi
632.41 Pondasi kepala jembatan
632.42 Pondasi Pilar
632.43 Pondasi angker

- 632.5 Bangunan bawah
- 632.51 Kepala jembatan
- 632.52 Pilar
- 632.53 Piloon
- 632.54 Landasan
- 632.6 Bangunan
- 632.61 Gelagar
- 632.62 Lantai
- 632.63 Perkerasan
- 632.64 Jalan orang/trotoar
- 632.65 Sandaran
- 632.66 Talang air
- 632.7 Bangunan pengaman
- 632.71 Turap/penahan
- 632.72 Bronjong
- 632.73 Strek Dam
- 632.74 Kist Dam
- 632.75 Coupute
- 632.76 Krip
- 632.8 Bangunan pelengkap
- 632.81 Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
- 632.82 Patok pengamanan
- 632.83 Patok R, O, W (Sempadan)
- 632.9 Oprit
- 632.91 Badan
- 632.92 Perkerasan
- 632.93 Drainage
- 632.94 Baku
- 632.95 Mediun
- 633 Jembatan pada jalan Nasional
- 633.1 Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)
- 633.2 Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek)
- 633.3 Pondasi
- 633.4 Bangunan bawah
- 633.5 Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
- 633.6 Bangunan Pengamanan (bronjong strek dam, krib)
- 633.7 Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
- 640 BANGUNAN**
- 641 Bangunan Pemerintah
- 641.1 Gedung Pengadilan
- 641.2 Rumah Pejabat Negara
- 641.3 Gedung DPR
- 641.4 Gedung Balai Kota
- 641.5 Penjara
- 641.6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan

- 642.1 Taman Kanak-kanak
- 642.2 SD & Sekolah Menengah
- 642.3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
- 643.1 Bangunan Olah Raga
- 643.2 Gedung Kesenian
- 643.3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
- 644.1 Pusat Perbelanjaan
- 644.2 Gedung Perdagangan
- 644.3 B a n k
- 644.4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
- 645.1 Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
- 645.2 Gedung parkir
- 645.3 Rumah Sakit
- 645.4 Gedung telkom
- 645.5 Terminal Angkutan Umum
- 645.6 Terminal Angkutan Air
- 645.7 Terminal Angkutan Darat
- 645.8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
- 646.1 Monumen
- 646.2 Candi
- 646.3 Kraton
- 646.4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
- 648.1 Rumah Perkantoran
- 648.11 Inti / Sederhana
- 648.12 Sedang / Mewah
- 648.2 Rumah Pedesaan
- 648.21 Rumah Contoh
- 648.3 Real estate
- 649 Elemen bangunan
- 649.1 Pondasi
- 649.11 Diatas Tiang
- 649.2 Dinding
- 649.21 Penahan beban
- 649.22 Tidak menahan beban
- 649.3 A t a p
- 649.4 Lantai / langit-langit
- 649.41 Suspendend
- 649.42 Solit
- 649.5 Pintu / jendela
- 649.51 Pintu hermonik

649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertical
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (Site dan Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (Home Industri)
655	Daerah Rekreasi (Open Spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Sport dan Playing Fields
655.3	Open Spece
656	Transportasi (Tata Letak)
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengereng Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
660	TATA LINGKUNGAN

- 660.1 Lingkungan Hidup
- 660.2 Kebersihan Lingkungan
- 660.3 Pencemaran
- 660.31 Pencemaran Air
- 660.32 Pencemaran Udara
- 660.33 Pencemaran Tanah
- 660.34 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
- 661 Kerusakan Lingkungan
- 661.1 Konservasi Pesisir dan Laut
- 661.2 Konservasi Sumber Daya Alam
- 662 Pentaatan Hukum Lingkungan
- 663 Laboratorium Lingkungan
- 663.1 Air
- 663.2 Udara
- 663.3 Tanah
- 664 Analisis Dampak Lingkungan
- 665 Pengembangan Teknologi Lingkungan
- 666 Pengembangan Kapasitas
- 667 Pengamanan Lingkungan
- 670 KETENAGAAN**
- 670.1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 671 Listrik
- 671.1 Kelistrikan
- 671.11 Perijinan
- 671.12 Rekomendasi
- 671.13 Pembinaan dan Pengawasan
- 671.11 Kelistrikan PLN
- 671.12 Kelistrikan non PLN
- 671.2 Pembangkit Tenaga Listrik
- 671.21 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
- 671.22 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- 671.23 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
- 671.24 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
- 671.25 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- 671.26 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- 671.27 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- 671.3 Transmisi tenaga listrik
- 671.31 Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo
- 671.32 Saluran Udara Tenaga Listrik
- 671.33 Kabel Bawah Tanah
- 671.4 Distribusi Tenaga Listrik
- 671.41 Gardu Distribusi
- 671.42 Tegangan Menengah
- 671.43 Tegangan Rendah
- 671.44 Jaringan Bawah Tanah
- 671.5 Pengusahaan Listrik

- 671.51 Sambungan Listrik
- 671.52 Penjualan Tenaga Listrik
- 671.53 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM**
- 690 AIR MINUM**
- 691 Intako
 - 691.1 Bromcaptering
 - 691.2 Sumur
 - 691.3 Bendungan
 - 691.4 Saringan (screen)
 - 691.5 Pintu air
 - 691.6 Saluran pembawa
 - 691.7 Alat ukur
 - 691.8 Perpompaan
- 692 Transmisi air baku
 - 692.1 Perpipaian
 - 692.2 Katup Udara (Air Rolief)
 - 692.3 Tutup penguras (blow oof)
 - 692.4 Bak pelepas tekanan
 - 692.5 Jembatan pipa
 - 692.6 Syphon
- 693 Instalasi pengelolaan
 - 693.1 Bangunan Ukur
 - 693.2 Bangunan Aerasi
 - 693.3 Bangunan Pengendapan
 - 693.4 Bangunan Pembubuh bahan kimia
 - 693.5 Bangunan Pengaduk
 - 693.6 Bangunan Saringan
 - 693.7 Perpompaan
 - 693.8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - 694.1 Reservoir menara bawah tanah
 - 694.11 Menara
 - 694.12 Reservoir menara bawah tanah
 - 694.2 Perpipaian
 - 694.3 Perpompaan
 - 694.4 Jembatan pipa
 - 694.5 Syphon

- 694.6 Hydran
- 694.61 Hydran umum
- 694.62 Hydran kebakaran
- 694.7 Katup
- 694.71 Katup Udara (air relief)
- 694.72 Katup pelepas (blow off)
- 694.8 Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)
- 700 PENGAWASAN**
- 700.1 Kebijakan dan program pengawasan
- 700.2 Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek
- 701 Pengawasan Inventarisasi Asset
- 702 Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
- 703 Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
- 704 Pengawasan Penelitian/Riset
- 705 Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
- 706 Pengawasan Pertahanan/BPN
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN**
- 711 Pengawasan Pemerintahan Provinsi
- 712 Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 713 Pengawasan Pemerintah Desa
- 720 BIDANG POLITIK**
- 721 Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
- 722 Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam
- 723 Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan
- 724 Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**
- 731 Pengawasan Kesbangpolinmas
- 732 Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 741 Pengawasan Pembangunan Desa
- 742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
- 743 Pengawasan Kebudayaan
- 744 Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
- 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
- 746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial
- 747 Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi
- 748 Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
- 749 Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN**
- 751 Pengawasan Perdagangan dan perindustrian
- 752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
- 753 Pengawasan Kehutanan
- 754 Pengawasan Pertambangan/ESDM

- 755 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 756 Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
- 757 Pengawasan PMDN/PMA
- 758 Pengawasan Perbankan/Moneter
- 759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**
- 761 Pengawasan Pengairan
- 762 Pengawasan Jalan
- 763 Pengawasan Jembatan
- 764 Pengawasan Bangunan
- 765 Pengawasan Tata Ruang Kota
- 766 Pengawasan Tata Lingkungan
- 767 Pengawasan Ketenagaan
- 768 Pengawasan Air Minum
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK**
- 771 Penyimpangan Pejabat Publik
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN**
- 781 Pengawasan Pengadaan PNS
- 782 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
- 783 Keanggotaan PNS dalam Parpol

- 784 Penyimpangan pejabat/PNS
- 785 Persengketaan PNS
- 790 BIDANG KEUANGAN**
- 791 Pengawasan Anggaran
- 792 Pengawasan Akuntansi
- 793 Pengawasan Perbendaharaan
- 794 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
- 795 Pengawasan Pendapatan
- 800 KEPEGAWAIAN**
- Termasuk klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
- 800.1 Perencanaan
- 800.2 Penelitian
- 800.3 Statistik
- 810 PENGADAAN**
- Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai
- 811 Pendaftaran CPNS
- 811.1 Testing
- 811.2 Screening
- 811.3 Pengumuman tes dan Pemanggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan CPNS
- 813.1 Pengangkatan CPNS golongan I
- 813.2 Pengangkatan CPNS golongan II
- 813.3 Pengangkatan CPNS golongan III

820 MUTASI

- 821 Pengangkatan
 - 821.1 Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 821.11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
 - 821.12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
 - 821.13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
 - 821.2 Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
 - 821.21 Eselon 1/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
 - 821.22 Eselon 2/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
 - 821.23 Eselon 3/ Jabatan Administrator
 - 821.24 Eselon 4/ Jabatan Pengawas
 - 821.3 Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - 822.1 PNS Golongan I
 - 822.2 PNS Golongan II
 - 822.3 PNS Golongan III
 - 822.4 PNS Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat
 - 823.1 PNS Golongan I
 - 823.2 PNS Golongan II
 - 823.3 PNS Golongan III
 - 823.4 PNS Golongan IV
- 824 Pemindehan/Pelimpahan/Pembantuan
 - 824.1 PNS Golongan I
 - 824.2 PNS Golongan II
 - 824.3 PNS Golongan III
 - 824.4 PNS Golongan IV
 - 824.5 Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer

830 KEDUDUKAN

- 831 Peninjauan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Perangkat/Gaji
 - 832.1 PNS Golongan I
 - 832.2 PNS Golongan II
 - 832.3 PNS Golongan III
 - 832.4 PNS Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah (pencantuman gelar)
- 834 Penghargaan lainnya

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

- 841 Tunjangan
 - 841.1 Struktural dan Fungsional

- 841.2 Kehormatan
- 841.3 Dana Kematian (Uang Duka)
- 841.4 Tambahan Penghasilan
- 841.5 Tunjangan Cacat
- 842 Dana
- 842.1 Taspen
- 842.2 Askes, Bantuan Kesehatan
- 842.3 Bantuan Pendidikan
- 843 Perawatan Kesehatan
- 843.1 Poliklinik , Klinik Konsultasi
- 843.2 Perawatan Dokter
- 843.3 Obat-obatan
- 843.4 Keluarga Berencana
- 845 Perumahan PNS
- 846 Dispensasi
- 850 C U T I**
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Bersalin
- 855 Cuti Karna Alasan Penting
- 856 Cuti di Luar Tanggungan Negara
- 860 PENILAIAN**
- 861 Penghargaan
- 861.1 Bintang / Satyalencana Karya Satya
- 861.2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- 861.3 Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat
- 861.4 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
- 862.1 Ringan
- 862.2 Sedang
- 862.3 Berat
- 863 Konduite / DP3
- 864 Ujian Dinas
- 864.1 Tingkat I
- 864.2 Tingkat II
- 865 Penilaian Kinerja
- 865.1 Struktural
- 865.2 Fungsional
- 866 Rehabilitasi
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN**
- 871 Formasi
- 872 Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
- 873.1 NIP
- 873.2 KARPEG

- 873.3 Legitimasi / Tanda Pengenal
- 873.4 Daftar Keluarga
- 873.5 KARSU / KARIS
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
- 874.1 Tanggal Lahir
- 874.2 Penggantian Nama
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
- 875.1 Pelimpahan Wewenangan
- 875.2 Spesimen Tanda Tangan
- 876 Korps Kepegawaian
- 880 PEMBERHENTIAN**
- 881 Atas Permintaan Sendiri Termasuk Pengunduran Diri
- 882 Dengan Hak Pensiun
- 882.1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
- 882.2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
- 882.3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
- 882.4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
- 882.5 Pensiun Janda / Duda
- 882.6 Pensiun Yatim Piatu
- 882.7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
- 884 Alasan Lain, Diantaranya Keuzuran Jasmani
- 885 Tidak Dengan Hormat
- 886 Pembekalan PNS Yang Akan Purna Tugas
- 887 Tali Asih Pensiun
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI**
- 890.1 Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
- 891 Pendidikan Prajabatan
- 892 Pendidikan Dalam Jabatan
- 892.1 Diklatpim
- 892.2 Diklat Teknis
- 892.3 Diklat Fungsional
- 893 Kursus-kursus ,Penataran , Bimbingan Teknis
- 894 Pengembangan Pegawai
- 894.1 Tugas Belajar
- 894.2 Ijin Belajar
- 894.3 Tunjangan Belajar
- 894.4 Bantuan Pendidikan
- 894.5 Penempatan Kembali
- 895 Metode
- 895.1 Kuliah
- 895.2 Ceramah , Symposium
- 895.3 Diskusi
- 895.4 Kuliah Lapangan / OL, Widya Wisata, KKN
- 895.5 Kurikulum
- 895.6 Karya Tulis

896	Tenaga Pengajar, Narasumber
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana Pendidikan
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
910	ANGGARAN
911	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan SKPD / PPKD
912	Keputusan Gubernur tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
913	DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD
914	Anggaran Kas
915	Surat Penyediaan Dana (SPD)
920	AKUNTANSI
921	Laporan –laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
930	PERBENDAHARAAN
931	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
932	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
933	Daftar Penguji SP2D
940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
941	Bimtek – bimtek / kursus yang berkaitan dengan keuangan
950	PENGELOLAAN KAS DAERAH
951	Laporan Pemotongan IWP,Taperum,PPh 21 dari gaji
952	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
953	Daftar pemotongan dan penyeteroran pajak (PPN / PPh) dari CV/PT Instansi
954	Surat tanda setoran (STS)
955	Laporan Realisasi Daerah
955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
956	Rekonsiliasi
956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
956.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
957	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan Perbandaharaan
963	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten /Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
965	Edaran-edaran
970	PENDAPATAN

- 971 Perimbangan Keuangan
 - 971.1 Bagi Hasil Pajak
 - 971.11 Pajak Bumi Bangunan (PBB)
 - 971.12 Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
 - 971.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
 - 971.2 Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 971.21 Sumber Daya Alam / Migas
- 972 Subsidi
- 973 Pajak
 - 973.1 Pajak Kendaraan Bermotor
 - 973.2 Pajak Kendaraan Diatas Air
 - 973.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 973.4 Pajak Pengendalian & Pemanfaatan Air Permukaan
 - 973.5 Pajak Reklame
- 974 Retribusi
 - 974.1 Retribusi Bidang Kesehatan
 - 974.2 Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
 - 974.3 Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)
 - 974.4 Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (termasuk pemotongan hewan)
 - 974.5 Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)
 - 974.6 Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
 - 974.7 Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
 - 974.8 Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air permukaan dan metrologi
 - 974.9 Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
- 975 Bea
 - 975.1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 975.2 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
- 976 Cukai
- 977 Pungutan
- 978 Bantuan
 - 978.1 Bantuan Presiden
 - 978.2 Bantuan Menteri
 - 978.3 Bantuan Gubernur
 - 978.4 Bantuan Bupati
 - 978.5 Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan Lainnya
 - 979.1 Hasil penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - 979.11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - 979.12 Penjualan Rumah Jabatan /Rumah Dinas
 - 979.13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2

- 979.14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
- 979.15 Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
- 979.16 Penjualan Drum Bekas
- 979.17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
- 979.2 Penerimaan Jasa Giro
- 979.21 Jasa Giro Kas Daerah
- 979.22 Jasa Giro Pemegang Kas
- 979.23 Jasa Giro Khusus
- 979.3 Penerimaan Bunga Bank
- 979.31 Bunga Deposito
- 979.32 Bunga Tabungan
- 979.4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
- 979.41 Sumbangan Pihak Ke Tiga
- 979.42 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
- 979.43 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
- 979.5 Penerimaan Lain-lain
- 979.51 Penerimaan Kembali Kredit Bank
- 979.52 Ternak Tidak Layak Bibit
- 979.53 Sewa Internet
- 979.54 Penerimaan Dari Dana Bergulir /Revolving
- 979.55 Kerjasama Dengan BUMD
- 979.56 Penerimaan
- 979.57 Tempat Rekreasi
- 979.58 Setoran TP-TGR
- 979.59 Penerimaan Lainnya dari Setda /SKPD
- 980** -
- 990** -

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI